



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

LAPORAN KEUANGAN

TAHUNAN TAHUN 2025 AUDITED
BAGIAN ANGGARAN 005.01.401968
BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG**

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2025 *AUDITED*

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran
Pemprov Bangka Belitung

Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telp. 0717-9111513

e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id



**LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG 401968**

**Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2025**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung
Telp. 0717-9111513
PANGKALPINANG - Babel
e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id**

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited* ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, 31 Desember 2025
Kuaşa Pengguna Anggaran,

The block contains a circular official stamp of the Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang. The stamp features the PTUN logo and the text 'PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.
NIP. 198112292006042015

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	01
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	04
II. Neraca.....	05
III. Laporan Operasional.....	06
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	08
V. Laporan Keuangan Tertentu dan Informasi Penting Lainnya.....	09
VI. Catatan atas Laporan Keuangan.....	12
A. Penjelasan Umum.....	12
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.....	12
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	13
A.3. Basis Akuntansi.....	13
A.4. Dasar Pengukuran.....	13
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	14
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	23
B.1. Pendapatan.....	25
B.2. Belanja.....	26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	28
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	28
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan.....	28
C.3. Persediaan.....	28
C.4. Tanah.....	30
C.5. Peralatan dan Mesin.....	30
C.6. Gedung dan Bangunan.....	30
C.7. Aset Tetap Lainnya.....	30

C.8.	Akumulasi Penyusutan.....	31
C.9.	Aset Lainnya.....	31
C.10.	Uang Muka dari KPPN.....	32
C.11.	Utang Kepada Pihak Ketiga dan Utang yang Belum Ditagihkan.....	32
C.12.	Ekuitas.....	32
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	33
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	33
D.2.	Beban Pegawai.....	34
D.3.	Beban Persediaan.....	34
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	35
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	36
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	37
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	37
D.8.	Kegiatan Non Operasional.....	37
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	38
E.1.	Ekuitas Awal.....	38
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	38
E.3.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	38
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	38
E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	39
E.5.	Ekuitas Akhir.....	39
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	40
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	40
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	40
Lampiran-lampiran		

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Provinsi Terpadu, Pangkalpinang - BABEL
Telp. 0717-911151, e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 31 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.
NIP. 198112292006042015

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan instansi, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 584,500,- dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 0,-

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 6.141.709.995,- atau mencapai 99,18 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 6.192.255.000,-

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022. Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 26.446.187.428,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 19,645.840,- ; Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 26,426,541,588,- Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 1,739,532,893,- Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 24,706,654,535,-. Jumlah

Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp 26.446.187.428,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.9,207,816,238,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.9,207,791,738,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa bernilai Rp 0, sehingga entitas mengalami surplus (defisit) - LO sebesar (Rp.9,207,231,738) .

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 27,692,750,778,- dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar (Rp.9,207,231,738,-), kemudian ditambah dengan koreksi nilai aset non revaluasi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 6,221,135,495,- menghasilkan kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp. (2,986,096,243,-) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 24,706,654,535,-

5. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

Berisi informasi keuangan tertentu yang tersaji sampai dengan 31 Desember 2025 . Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi pendukung atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2025.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 *Audited (dalam satuan Rupiah)*

NO	URAIAN	2025			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (SAWAH)	%
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	584,500	0	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	0	0	0
B	BELANJA				0
	I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	6,192,255,000	6,141,709,995	(50,545,005)	99.18
	BELANJA PEGAWAI	4,528,800,000	4,479,139,923	(49,660,077)	99.91
	BELANJA BARANG	1,171,177,000	1,171,026,576	(150,424)	99.99
	BELANJA MODAL	492,478,000	491,543,496	(934,504)	99.61
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0
	II. TRANSFER KE DAERAH	0	0	0	0
	DANA BAGI HASIL	0	0	0	0
	DANA ALOKASI UMUM	0	0	0	0
	DANA TRANSFER KHUSUS	0	0	0	0
	DANA OTONOMI KHUSUS	0	0	0	0
	DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	0	0	0	0
	DANA DESA	0	0	0	0
	DANA INSENTIF FISKAL	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	6,192,255,000	6,141,709,995	(50,545,005)	99.18
C	PEMBIAYAAN	0	0	0	0

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NERACA
PER 31 Desember 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
Audited (dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja dibayar dimuka (prepaid)	325,600	0	325,600	0
Persediaan	19,320,240	2,602,450	16,717,790	642.39
JUMLAH ASET LANCAR	19,645,840	2,602,450	17,043,390	654.90
ASET TETAP				
Tanah	25,308,000	25,308,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	7,664,791,903	7,093,238,407	571,553,496	0.10
Gedung dan Bangunan	26,580,019,989	26,580,019,989	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	190,000	190,000	0	0.00
Akumulasi Penyusutan	(7,843,768,304)	(6,004,149,798)	(1,839,618,506)	30.64
JUMLAH ASET TETAP	26,426,541,588	27,694,606,598	(1,268,065,010)	(4.58)
Aset Lain-lain	20,290,000	20,290,000	0	0
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	(20,290,000)	(20,290,000)	0	0
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	26,446,187,428	27,697,209,048	(1,251,021,620)	(4.52)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,739,532,893	4,458,270	1,735,074,623	38.918,11
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,739,532,893	4,458,270	1,735,074,623	38.918,11
JUMLAH KEWAJIBAN	1,739,532,893	4,458,270	1,735,074,623	38.918,11
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	24,706,654,535	27,692,750,778	(2,986,096,243)	(10.78)
JUMLAH EKUITAS	24,706,654,535	27,692,750,778	(2,986,096,243)	(10.78)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	26,446,187,428	27,697,209,048	(1,251,021,620)	(4.52)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

LAPORAN OPERASIONAL

PER 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

Audited (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	2025	2024	KEMAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	24,500	0	24,500	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
JUMLAH PENDAPATAN	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	6,195,840,274	2,653,459,607	3,542,380,667	133.5
Beban Persediaan	28,616,200	30,125,800	(1,509,600)	(5.01)
Beban Barang dan Jasa	666,676,672	637,527,900	29,348,772	4.60
Beban Pemeliharaan	439,035,576	338,805,840	100,229,736	29.58
Beban Perjalanan Dinas	57,829,010	165,217,620	(127,388,610)	(77.10)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,839,616,506	1,784,775,220	54,841,286	3.07
JUMLAH BEBAN	9,207,816,238	5,609,911,987	3,597,879,751	64.13
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(9,207,791,738)	(5,609,911,987)	(3,597,879,751)	64.13
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	560,000	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	

Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	560,000	0	560,000	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(9,207,231,738)	(5,609,911,987)	(3,597,879,751)	64.124
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT – LO	(9,207,231,738)	(5,609,911,987)	(3,597,879,751)	64.124

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TATA USAHA PANGKALPINANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

Audited (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	27,692,750,778	29,468,950,981	(1,776,200,203)	(6.03)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9,207,231,738)	(5,808,911,887)	(3,597,319,751)	64.12
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	401,037	(401,037)	(100)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	401,037	(401,037)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	8,221,135,495	3,833,310,747	2,387,824,748	62.29
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,986,096,243)	(1,776,200,203)	(1,209,896,040)	68.12
EKUITAS AKHIR	24,706,654,535	27,692,750,778	(2,986,096,243)	(10.78)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V.LAPORAN KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

V. Laporan Keuangan Tertentu dan Informasi Penting Lainnya

A. Laporan Keuangan Tertentu

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d. 31 Desember 2025

Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
A. Pagu	4,528,600,000	1,171,177,000	492,478,000	6,192,255,000
B. Realisasi s.d 31 Des 2025	4,479,139,923	1,171,026,576	491,543,496	6,141,709,995
C. % Realisasi s.d 31 Des 2025	98.91%	99.99%	98.81%	99.18%
D. Pagu Blokir	-	-	-	-
E. % Realisasi setelah memperhitungkan blokir (B/(A-D))	98.91%	99.99%	98.81%	99.18%
F. Trajectory IKPA	-	-	-	-
G. Sisa pagu s.d 31 Des 2025 termasuk blokir (A-B)	49,460,077	150,424	934,504	50,545,005

Sampai dengan Desember Tahun 2025, realisasi belanja pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebesar Rp. 6,141,709,995 atau setara dengan 99.81%.

B. Informasi Penting Lainnya

1. Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran Per 31 Desember 2025

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung
 Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
 Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
 Fungsi : Ketertiban dan Keamanan
 Sub Fungsi : Peradilan
 Program : Program Dukungan Manajemen
 Lokasi : Kep. Bangka Belitung

Kategori Pelanggaran : KADAMALUK

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Suber	Uraian Suber	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Kinerja Robot	Efisiensi SPR (Pangkas)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Nilai DIPA	Deviasi Positif atau DIPA	Penyusunan Anggaran	Revisi Rincian	Penyusunan Tagihan	Penyusunan UP dan TUP	Capaian Output				
1	016	226	401369	PENJAJARAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG	Nilai	100.00	97.95	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.95	100%	0.00	98.95
					Subsidi	10	95	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.85	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Rata-rata	50.00		100.00				100.00				

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 98,95 % dan jika dikonversi bobot 100% dan nilai akhir 98,95

2. Laporan Kinerja

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA DESEMBER TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung
 Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
 Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
 Fungsi : Ketertiban dan Keamanan
 Sub Fungsi : Peradilan
 Program : Program Dukungan Manajemen
 Lokasi : Kep. Bangka Belitung

Kode	Rincian Output	Belanja			Output				Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
005.01.WA.1 071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	492.478,000	491.543,496	99.81	24	24	Unit	100	
005.01.WA.6 986.EBA.962	Layanan Umum	700,000	650,000	92.86	1	1	Laporan	100	
005.01.WA.6 986.EBA.994	Layanan Perkantoran	5.698.777,000	5.651.066,826	99.16	1	1	Layanan	100	
005.01.WA.6 986.EBA.953	Layanan pemantauan dan Evaluasi	300.000	300.000	100	1	1	Dokumen	100	
	Total	6.192.255,000	6.141.709,995	99.18					

VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didirikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terletak di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan tahunan tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu Rangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dan Modul Aset Tetap SAKTI. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Aset Tetap SAKTI adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumberpendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi
 apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (*revaluasi*) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 September 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh Penilai

Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek selain Tanah.

- Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Asset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Asset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, asset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan),

dan kas yang dibatasi penggunaannya. KM,

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melakukan 22 (dua puluh dua) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut:

1. Revisi I tanggal 7 Januari 2025 berupa Revisi Pemutakhiran KPA Terkait Akun Tunjangan Pejabat Negara Pada Belanja Pegawai.
2. Revisi II tanggal 23 Februari 2025 berupa Revisi Hal. III DIPA Terkait Rencana Penarikan Dana Triwulan I (Januari-Maret) dan Revisi Efisiensi Anggaran TA 2025.
3. Revisi III tanggal 23 Maret 2025 berupa Revisi Buka Blokir Efisiensi Anggaran TA 2025.
4. Revisi IV tanggal 21 April 2025 tentang Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan II (April-Juni) dan Pemutakhiran POK.
5. Revisi V tanggal 28 Mei 2025 berupa Revisi Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Belanja Pegawai.
6. Revisi VI tanggal 21 Juni 2025 tentang Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas dan Revisi POK Belanja Pegawai.
7. Revisi VII tanggal 9 Juli 2025 tentang Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan III (Juli-September).
8. Revisi VIII tanggal 22 Juli 2025 berupa Revisi Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Belanja Pegawai.
9. Revisi IX tanggal 11 Agustus 2025 berupa Revisi POK Belanja Pegawai.
10. Revisi X tanggal 12 Agustus 2025 berupa Revisi POK Kewenangan KPA.
11. Revisi XI tanggal 1 September 2025 berupa Revisi POK Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
12. Revisi XII tanggal 8 September 2025 berupa Revisi POK Belanja Pegawai.
13. Revisi XIII tanggal 23 September 2025 berupa Revisi ABT Belanja Pegawai, Penarikan PAGU PPNPN dan Penambahan PAGU Sewa Rumah Dinas Hakim.
14. Revisi XIV tanggal 8 Oktober 2025 berupa Revisi ABT Belanja Modal Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Fasilitas Perkantoran.
15. Revisi XV tanggal 11 Oktober 2025 berupa Revisi Hal III DIPA Triwulan IV (Oktober-Desember).

16. Revisi XVI tanggal 24 Oktober 2025 berupa Revisi Terpusat Buka Blokir PAGU Perjalanan Dinas.
17. Revisi XVII tanggal 28 Oktober 2025 berupa Revisi Pemutakhiran KPA Terkait Pergeseran PAGU Belanja Barang.
18. Revisi XVIII tanggal 14 November 2025 berupa Revisi Terpusat ABT Belanja Pegawai.
19. Revisi XIX tanggal 17 November 2025 berupa Revisi Pemutakhiran KPA Terkait Pergeseran PAGU Belanja Modal.
20. Revisi XX tanggal 26 November 2025 berupa Revisi Pemutakhiran KPA.
21. Revisi XXI tanggal 28 November 2025 berupa Revisi Pemutakhiran KPA.
22. Revisi XXII tanggal 12 Desember 2025 berupa Revisi Pemutakhiran KPA.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	2,782,746,000	4,528,600,000
Belanja Barang	1,237,663,000	1,171,177,000
Belanja Modal	399,978,000	492,478,000
Jumlah Belanja	4,420,687,000	6,192,255,000

B.1. PendapatanRealisasi Pendapatan
Rp. 0,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir dari pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,-

No.	Mekanisme	2025		
		Anggaran	Realisasi	% Real
1.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	560,000	0
2.	Pendapatan denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	24,500	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji.	0	0	0
4.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
	Total Pendapatan	0	584,500	0

Rincian Estimasi dan Realisasi PNB
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	560,000	0	0
2.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	24,500	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
4.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
Total Pendapatan		584,500	0	

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara :
Rp6,141,709,995

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 6,141,709,995 ,- atau sebesar 99.18% dari anggaran senilai Rp. 6.192.255.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember TA 2025 adalah sebagai berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2025

Uraian	2025		%
	Pagu	Realisasi	
Belanja Pegawai	4,528,600,000	4,480,990,250	98.91
Belanja Barang	1,171,177,000	1,172,180,576	99.99
Belanja Modal	492,478,000	491,543,496	99.81
Total Belanja Bruto	6,192,255,000	6,144,714,322	99.57
Pengembalian Belanja	0	3,004,327	0,00
Total Belanja Netto	6,192,255,000	6,141,709,995	98.18

Dibandingkan dengan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024, yakni sebesar Rp 3,826,310,747,- yang menyerap 98.13% anggaran dari total PAGU Rp 3,899,182,000,-, Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan persentase sebesar 1.05%.

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai :
Rp4,479,139,923

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 4,479,139,923,- yang terdiri dari belanja pegawai bruto Rp.4,480,990,250,- dan pengembalian belanja sebesar Rp. 1,850,327- . Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang :
Rp.1,171,026,576

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 1,171,026,576,-

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 0

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp. 0,- Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2025

Uraian	TA 2025
Uang Tunai di Brankas	0
Uang di Bank	0
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	0
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	0

Kas di Bendahara
Penerimaan:
Rp 0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember TA 2025

Uraian	TA 2025
Uang Tunai di Brankas	0
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	0
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	0

C.3. Persediaan

Persediaan
Rp
19,320,240

Persediaan per 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp. 19,320,240,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan Per 31 Desember TA 2025

Uraian	TA 2025
Barang Konsumsi	16,096,240
Bahan Untuk Pemeliharaan	3,224,000
Total	19,320,240

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan berita acara stock opname fisik .

C.4. Tanah

Tanah merupakan aset tetap berwujud yang diperoleh dalam kondisi siap pakai atau juga disempurnakan terlebih dahulu sampai siap pakai untuk operasional kantor. Tanah memiliki nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan tidak diperjualbelikan dalam jalannya kegiatan kantor. Aset tetap berupa tanah dalam akuntansi dinilai berdasarkan harga perolehan. Tanah Per 31 Desember 2025 disajikan senilai Rp 25.308,000,-.

C.5. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 adalah Rp. 7,664,791,903,- dengan nilai buku sebesar Rp 4,555,356,576,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal	7,093,238,407
Mutasi Tambah	177,390,340
Pembelian	491,543,496
Transfer Masuk	80,010,000
Reklas Masuk	56,443,500
Mutasi Kurang	(56,443,500)
Reklas Keluar	(56,443,500)
Saldo per 31 Desember 2025	7,664,791,903
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(5,733,890,215)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1,930,901,688

C.6. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang disajikan sebesar Rp 26,580,019,989,- dengan akumulasi penyusutan senilai Rp 2,109,878,089,-, sehingga nilai buku menjadi sebesar Rp 24,470,141,900,-. Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diperoleh dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan TA 2022. Nilai gedung dan bangunan berasal dari segala pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan

siap digunakan meliputi biaya perencanaan, konstruksi, pengawasan, dan biaya administrasi lain-lain.

C.7. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/ kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca. Selain itu, termasuk Aset Tetap lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset. Aset tetap lainnya disajikan sebesar Rp 190.000,- yang merupakan 2 buah monografi.

C.8. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp (7,843,768,304,-) yang terdiri dari akumulasi penyusutan aset Peralatan dan Mesin senilai Rp 5,733,890,215,- dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp. 2,109,878,089.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.9. Aset Lainnya

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset tetap dan Aset Lainnya yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Aset lain-lain Per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp 20.290.000,- yang merupakan peralatan dan mesin berupa mesin absensi senilai Rp 6.100.000,-, kursi besi/metal senilai Rp 4.200.000,-, PC senilai Rp 9.990.000,- yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat. Aset ini bernilai buku Rp 0,- setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 20.290.000,-.

C.10. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.11. Utang Kepada Pihak Ketiga dan Utang yang Belum Ditagihkan

Saldo utang kepada pihak ketiga Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1,739,532,893, yang merupakan kekurangan gaji pegawai Bulan Desember 2025 sebesar Rp 1,720,677,321,- Pembayaran tagihan listrik bulan Desember 2025 Rp. 18,429,607,- dan Pembayaran tagihan telepon dibulan Desember 2025 senilai Rp 425,965,-.

C.12. Ekuitas

Ekuitas:
Rp 24,706,654,535,-

Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 24,706,654,535,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP :
Rp. 584,500

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah
Rp. 584,500

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025

Uraian	TA 2025	%
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	560,000	0
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	24,500	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	
Total Pendapatan	584,500	0

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang
dan Jasa :
Rp 666,876,672,-

Jumlah Beban Jasa per 31 Desember TA 2025 sebesar Rp. 666,876,672,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan asset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya meningkatnya kebutuhan biaya operasional perkantoran, beban langganan listrik dan beban jasa lainnya.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025

Akun	Uraian	Jumlah
521111	Beban Keperluan Perkantoran	469,928,800
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,629,600
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	52,300,000
521211	Beban Bahan	300,000
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	650,000
522111	Beban Langganan Listrik	18,429,607
522112	Beban Langganan Telepon	5,138,685
522141	Beban Sewa	118,400,000
JUMLAH		666,876,672

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp 439,035,576,-

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 439,035,576,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Peningkatan beban pemeliharaan karena adanya kenaikan pada pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya.

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025

Akun	Uraian	Jumlah
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	275,082,076
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	157,614,950
523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-1,154,000
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	7,492,550
JUMLAH		439,035,576

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas :
Rp 37,829,010

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp. 37,829,010,- Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025

Akun	Uraian	Jumlah
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	37,189,010
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	640,000
JUMLAH		37,829,010

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp. 1,839,618,506,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2025 sebesar Rp.1,839,618,506,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 Audited

Akun	Uraian	Jumlah
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,307,946,601
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	531,671,905
JUMLAH		1,839,618,506

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional : Rp.0

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 Audited

Uraian	TA 2025
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0
Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp. 27,692,750,778,-

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp. 27,692,750,778,-

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO
: (Rp9,207,231,738,-)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp.9,207,231,738,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi:
Rp 0

Koreksi Nilai Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan asset lainnya yang disebabkan adanya koreksi pencatatan nilai berkurang aset gedung dan bangunan

E.4. Transaksi Antar Entitas

Koreksi Antar
Entitas:
Rp6,221,135,495,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 6,221,135,495,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	6,141,709,995
Diterima Dari Entitas Lain	-584,500
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	80,010,000
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	6,221,135,495

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp. -584,500,- sedangkan DKEL sebesar Rp.6,141,709,995,-

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir :
Rp. 24,706,654,535,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 24,706,654,535,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Pengungkapan atas Belanja Penanganan Pandemi Covid-19

Tidak ada PAGU Belanja penanganan Pandemi Covid-19 pada Semester II TA 2025.

F.2.2. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK baik di Tahun Anggaran 2025 maupun Tahun Anggaran sebelumnya.

F.2.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual akan dijelaskan pada laporan keuangan Tahunan Tahun 2025.

F.2.4. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah :

1. BRI Cab. Pangkalpinang A/C 653244019681000 a.n. BPG 015 PTUN PKP yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0.
2. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 651554034291000 a.n. BPG 015 PTUN PKP 403429 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0.
3. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 0063-01-002185-30-7 a.n. RPL 015 PDT PTUN PKP UTK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp6,428,920.

F.2.5. Revisi DIPA

Pada periode Laporan Keuangan Semester II 2025 terdapat 22 (dua puluh dua) Revisi DIPA yaitu:

1. **Revisi I** tanggal 7 Januari 2025 berupa Revisi Pemutakhiran KPA Terkait Akun Tunjangan Pejabat Negara Pada Belanja Pegawai.
2. **Revisi II** tanggal 23 Februari 2025 berupa Revisi Hal. III DIPA Terkait Rencana Penarikan Dana Triwulan I (Januari-Maret) dan Revisi Efisiensi Anggaran TA 2025.
3. **Revisi III** tanggal 23 Maret 2025 berupa Revisi Buka Blokir Efisiensi Anggaran TA 2025.
4. **Revisi IV** tanggal 21 April 2025 tentang Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan II (April-Juni) dan Pemutakhiran POK.
5. **Revisi V** tanggal 28 Mei 2025 berupa Revisi Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Belanja Pegawai.
6. **Revisi VI** tanggal 21 Juni 2025 tentang Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas dan Revisi POK Belanja Pegawai.
7. **Revisi VII** tanggal 9 Juli 2025 tentang Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan III (Juli-September).
8. **Revisi VIII** tanggal 22 Juli 2025 berupa Revisi Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Belanja Pegawai.
9. **Revisi IX** tanggal 11 Agustus 2025 berupa Revisi POK Belanja Pegawai.
10. **Revisi X** tanggal 12 Agustus 2025 berupa Revisi POK Kewenangan KPA.
11. **Revisi XI** tanggal 1 September 2025 berupa Revisi POK Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
12. **Revisi XII** tanggal 8 September 2025 berupa Revisi POK Belanja Pegawai.

13. **Revisi XIII** tanggal 23 September 2025 berupa Revisi ABT Belanja Pegawai, Penarikan PAGU PPNPN dan Penambahan PAGU Sewa Rumah Dinas Hakim.
14. **Revisi XIV** tanggal 8 Oktober 2025 berupa Revisi ABT Belanja Modal Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Fasilitas Perkantoran.
15. **Revisi XV** tanggal 11 Oktober 2025 berupa Revisi Hal III DIPA Triwulan IV (Oktober-Desember).
16. **Revisi XVI** tanggal 24 Oktober 2025 berupa Revisi Terpusat Buka Blokir PAGU Perjalanan Dinas.
17. **Revisi XVII** tanggal 28 Oktober 2025 berupa Revisi Pemutakhiran KPA Terkait Pergeseran PAGU Belanja Barang.
18. **Revisi XVIII** tanggal 14 November 2025 berupa Revisi Terpusat ABT Belanja Pegawai.
19. **Revisi XIX** tanggal 17 November 2025 berupa Revisi Pemutakhiran KPA Terkait Pergeseran PAGU Belanja Modal.
20. **Revisi XX** tanggal 26 November 2025 berupa Revisi Pemutakhiran KPA.
21. **Revisi XXI** tanggal 28 November 2025 berupa Revisi Pemutakhiran KPA.
22. **Revisi XXII** tanggal 12 Desember 2025 berupa Revisi Pemutakhiran KPA.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada periode Laporan Keuangan Tahun 2025 terdapat 2 koreksi SPM belanja pegawai, 1 transaksi PNPB dari denda keterlambatan pekerjaan pemerintah, 1 transaksi dari penjualan peralatan dan mesin, 1 SPM pengembalian belanja peralatan dan mesin

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya yang dapat dijabarkan pada laporan keuangan Tahun 2025 ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (095) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM
Tgl Cetak : 06/05/26 4:43 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	469,928,800	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,829,600	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	52,200,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomplabel	650,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	18,429,607	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,138,665	0
3.0	522141	Beban Sewa	118,400,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	275,082,076	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	156,460,950	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	37,189,010	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	640,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,307,946,601	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	531,671,905	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	28,616,200	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	7,492,550	0
JUMLAH			43,518,646,470	43,518,646,470

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 198112262006042015

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM
Tgl Cetak : 06/05/26 4:43 PM
Halaman : 1
lap_to_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	24,500	0	24,500	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	24,500	0	24,500	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	24,500	0	24,500	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6,195,840,274	2,653,459,607	3,542,380,667	133.5
Beban Persediaan	28,616,200	30,125,800	(1,509,600)	(5.011)
Beban Barang dan Jasa	606,876,672	637,527,900	29,348,772	4.604
Beban Pemeliharaan	439,035,576	338,805,840	100,229,736	29.683
Beban Perjalanan Dinas	37,629,010	165,217,620	(127,388,610)	(77.104)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM
Tgl Cetak : 06/05/26 4:43 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,839,818,506	1,784,775,220	54,843,286	3.073
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	9,207,816,238	5,609,911,987	3,597,904,251	64.135
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(9,207,791,738)	(5,609,911,987)	(3,597,879,751)	64.134
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	560,000	0	560,000	
Pendapatan Pelepasan Aset	560,000	0	560,000	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	560,000	0	560,000	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(9,207,231,738)	(5,609,911,987)	(3,597,319,751)	64.124
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(9,207,231,738)	(5,609,911,987)	(3,597,319,751)	64.124

Keterangan :

FINAL

Pangkalpinang, 8 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 198112292006042015

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM
Tgl Cetak : 06/05/26 4:43 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	325,600	0	325,600	0.00
Persediaan	19,320,240	2,602,450	16,717,790	642.39
JUMLAH ASET LANCAR	19,645,840	2,602,450	17,043,390	654.90
ASET TETAP				
Tanah	25,308,000	25,308,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	7,664,791,903	7,093,238,407	571,553,496	8.06
Gedung dan Bangunan	26,580,019,989	26,580,019,989	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	190,000	190,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(7,843,768,304)	(6,004,149,798)	(1,839,618,506)	30.64
JUMLAH ASET TETAP	26,426,541,588	27,694,606,598	(1,268,065,010)	(4.58)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	20,290,000	20,290,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(20,290,000)	(20,290,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	26,446,187,428	27,697,209,048	(1,251,021,620)	(4.52)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,739,532,893	4,458,270	1,735,074,623	38,918.11
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,739,532,893	4,458,270	1,735,074,623	38,918.11
JUMLAH KEWAJIBAN	1,739,532,893	4,458,270	1,735,074,623	38,918.11
EKUITAS				
EKUITAS	24,706,654,535	27,692,750,778	(2,986,096,243)	(10.78)
JUMLAH EKUITAS	24,706,654,535	27,692,750,778	(2,986,096,243)	(10.78)
JUMLAH EKUITAS	24,706,654,535	27,692,750,778	(2,986,096,243)	(10.78)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	26,446,187,428	27,697,209,048	(1,251,021,620)	(4.52)

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP. 198112292006042015

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 06/05/26 4:43 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	6,141,709,995
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	584,500	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	560,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	24,500
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,131,135,400	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16,842	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	58,916,986	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	13,956,038	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40,320,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	55,485,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	6,101,263	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	47,217,840	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	190,179,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	12,140,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	136,350,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	368,796,805	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,335,000,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	60,275,000	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,716	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,004,600	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,027,760	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	17,745,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	4,320,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	470,254,400	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,886,600	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	52,200,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	300,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	650,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	52,826,540	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	5,137,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	118,400,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	275,082,076	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	157,614,950	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37,189,010	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	640,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	491,543,496	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	327
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,850,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 06/05/26 4:43 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_saker_pnc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	1,154,000
JUMLAH			6,145,298,822	6,145,298,822

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DORA NATALIA SINGARIMBUN
196112292006042015

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 06/05/26 1:41 PM
Tgl Cetak : 06/05/26 4:43 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	325,600	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	16,096,240	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,224,000	0
0.0	131111	Tanah	25,308,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,664,791,903	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	26,580,019,989	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	190,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,733,890,215
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,109,878,089
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	20,290,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	20,290,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	1,720,677,321
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	18,855,572
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	6,141,709,995
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	584,600	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	80,010,000
0.0	391111	Ekuitas	0	27,692,750,776
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	560,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	24,500
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,131,044,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	16,470	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	58,918,988	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	13,958,038	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	40,320,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	52,485,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	5,214,838	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	47,217,840	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	190,179,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10,290,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	138,350,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	771,874,126	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	3,652,600,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	60,276,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,716	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,004,600	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2,027,760	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	17,745,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	4,320,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG 401968

Tgl Data : 05/05/26 1:41 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 4:43 PM
Halaman : 1
lap_fra_face_saker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Pendapatan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	584,500	584,500	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	584,500	584,500	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	584,500	584,500	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	6,182,255,000	6,141,709,995	(50,545,005)	99	3,898,182,000	3,826,310,747	72,871,253	98
1. Belanja Pegawai	4,528,600,000	4,479,139,923	(49,460,077)	99	2,719,679,000	2,652,052,637	67,626,363	98
2. Belanja Barang	1,171,177,000	1,171,028,576	(150,424)	100	1,179,503,000	1,174,258,118	5,244,890	100
3. Belanja Modal	482,478,000	491,543,496	(934,504)	100	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG 401966

Tgl Data : 06/05/25 1:41 PM
Tgl Cetak : 06/05/26 4:43 PM
Halaman : 2
lap_fra_face_saker_new_poc

URAIAN	2025					2024		
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1.	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.1 + B.II)	6,192,255,000	6,141,709,985	(50,545,005)	99	3,890,182,000	3,826,310,747	72,871,253	98
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 196112292006042015



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 401968

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Kode Lap : LRA/P.E1.1
Tanggal : 06/05/26 4:44 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_ealifer

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan	0	560,000	0	560,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	560,000	0	560,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251					
4256	Pendapatan Denda					
425611	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	24,500	0	24,500	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	24,500	0	24,500	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	584,500	0	584,500	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	584,500	0	584,500	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 401968
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 4:44 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_saktet_poc
Tgl Data : 5/5/26 2:13 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	905,080,000	1,132,539,000	1,131,135,400	0	1,131,135,400	95.87	1,503,800
51111	Belanja Gaji Pokok PNS	14,000	19,000	16,842	327	16,515	86.92	2,485
51119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	90,509,000	59,460,000	58,916,986	0	58,916,986	99.09	543,014
51121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	13,748,000	14,780,000	13,956,038	0	13,956,038	94.43	823,962
51122	Belanja Tunj. Anak PNS	40,320,000	40,760,000	40,320,000	0	40,320,000	98.92	440,000
51123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,225,840,000	55,680,000	55,485,000	0	55,485,000	99.65	195,000
51124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	215,784,000	6,178,000	6,101,263	0	6,101,263	98.76	75,737
51125	Belanja Tunj. PPh PNS	38,695,000	48,200,000	47,217,840	0	47,217,840	97.96	882,160
51126	Belanja Tunj. Beras PNS	166,066,000	196,798,000	190,179,000	0	190,179,000	96.64	6,819,000
51129	Belanja Uang Makan PNS	7,700,000	12,185,000	12,140,000	1,850,000	10,290,000	84.45	1,895,000
51151	Belanja Tunjangan Umum PNS	81,000,000	137,700,000	136,350,000	0	136,350,000	99.02	1,350,000
51157	Belanja Tunjangan Kematihan Hakim							
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,782,746,000	1,704,389,000	1,681,818,369	1,850,327	1,689,968,042	99.15	14,430,988
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0	397,112,000	368,796,805	0	368,796,805	92.87	28,315,195
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	2,341,800,000	2,335,000,000	0	2,335,000,000	99.72	6,600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	0	2,738,712,000	2,703,796,805	0	2,703,796,805	99.73	34,915,195
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	80,276,000	60,276,000	0	60,276,000	100	0
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	6,000	1,716	0	1,716	28.6	4,284
511621	Belanja Tunjangan Suami/istri PPPK	0	1,008,030	1,004,600	0	1,004,600	99.65	3,400
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	1,000	0	0	0	0	1,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	2,028,000	2,027,760	0	2,027,760	99.99	240
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	17,850,000	17,745,000	0	17,745,000	99.41	105,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	4,320,000	4,320,000	0	4,320,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	85,489,000	85,375,076	0	85,375,076	99.87	113,824
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2,782,746,000	4,528,600,000	4,480,990,250	1,850,327	4,479,139,923	98.91	49,480,077
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	555,189,000	470,259,000	470,254,400	0	470,254,400	100	4,600
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,000,000	1,887,000	1,886,600	0	1,886,600	99.98	400
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	48,600,000	52,200,000	52,200,000	0	52,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	609,789,000	624,346,000	624,341,000	0	624,341,000	100	5,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESOLON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 401968
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 08/05/26 4:44 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_ra_bel_atun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 2:13 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
521252	Belanja Perlatan dan Mesin - Ekstrakompiabel	700,000	700,000	650,000	0	650,000	92.86	50,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,000,000	1,000,000	950,000	0	950,000	95	50,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	54,272,000	52,827,000	52,826,540	0	52,826,540	100	460
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	54,272,000	52,827,000	52,826,540	0	52,826,540	100	460
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langgitanan Telepon	6,000,000	5,137,000	5,137,000	0	5,137,000	100	0
522141	Belanja Sewa	50,368,000	118,400,000	118,400,000	0	118,400,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	56,368,000	123,537,000	123,537,000	0	123,537,000	100	0
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	190,662,000	275,085,000	275,082,076	0	275,082,076	100	2,924
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	248,680,000	186,472,000	157,614,950	1,154,000	156,460,950	99.99	11,050
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	439,342,000	431,557,000	432,697,026	1,154,000	431,543,026	100	13,974
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77,220,000	37,270,000	37,189,010	0	37,189,010	99.78	80,990
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	640,000	640,000	0	640,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	77,220,000	37,910,000	37,829,010	0	37,829,010	99.79	80,990
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,237,863,000	1,171,177,000	1,172,180,576	1,154,000	1,171,026,576	99.99	150,424
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	399,978,000	492,478,000	491,543,496	0	491,543,496	99.81	934,504
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	399,978,000	492,478,000	491,543,496	0	491,543,496	99.81	934,504
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	399,978,000	492,478,000	491,543,496	0	491,543,496	99.81	934,504
	JUMLAH BELANJA	4,420,687,020	6,192,255,000	6,144,714,322	3,004,327	6,141,709,995	99.18	50,545,005

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 06/05/26 4:43 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	27,692,750,778	29,488,950,981	(1,776,200,203)	(6.03)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9,297,231,738)	(5,609,911,987)	(3,597,319,751)	64.12
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	401,037	(401,037)	(100)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	401,037	(401,037)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	6,221,135,495	3,833,310,747	2,387,824,748	62.29
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,986,096,243)	(1,776,200,203)	(1,209,896,040)	68.12
EKUITAS AKHIR	24,706,654,535	27,692,750,778	(2,986,096,243)	(10.78)

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 198112292006042015

RINCIAN SURPLUS/DEFISIT-LO TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025

catu_tpe_akun_satker_pos

Akun	Uraian	2025	2024
391112	Surplus/Defisit-LO	0	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	560,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	560,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	24,500	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	24,500	0
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0
511111	Beban Gaji Pokok PNS	-1,131,044,900	-917,148,160
511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	-1,131,044,900	-917,148,160
511125	Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	-5,214,838	-175,009,724
511126	Beban Tunj. Beras PNS	-47,217,840	-39,106,800
511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	-47,217,840	-39,106,800
511129	Beban Uang Makan PNS	-190,179,000	-142,581,000
511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-190,179,000	-142,581,000
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	-16,470	-12,243
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-16,470	-12,243
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-58,916,986	-48,530,870
511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-58,916,986	-48,530,870
511122	Beban Tunj. Anak PNS	-13,956,038	-13,385,810
511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	-13,956,038	-13,385,810
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	-40,320,000	-40,320,000
511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	-40,320,000	-40,320,000
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	-52,485,000	-1,195,100,000
511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	-52,485,000	-1,195,100,000
511125	Beban Tunj. PPh PNS	-5,214,838	-175,009,724
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	-10,290,000	-9,365,000
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-10,290,000	-9,365,000
511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	-136,350,000	-72,900,000
511157	Pengembalian Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	-136,350,000	-72,900,000
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	-60,276,000	0
511611	Pengembalian Beban Gaji Pokok PPPK	-60,276,000	0
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	-1,716	0
511619	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PPPK	-1,716	0
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	-1,004,600	0
511621	Pengembalian Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	-1,004,600	0
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	-2,027,760	0
511625	Pengembalian Beban Tunjangan Beras PPPK	-2,027,760	0
511628	Beban Uang Makan PPPK	-17,745,000	0
511628	Pengembalian Beban Uang Makan PPPK	-17,745,000	0
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	-4,320,000	0
511633	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PPPK	-4,320,000	0
511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	-771,874,126	0
511324	Pengembalian Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	-771,874,126	0

511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	-3,652,600,000	0
511339	Pengembalian Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	-3,652,600,000	0
523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-275,082,076	-179,074,400
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-156,460,950	-152,319,130
523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-156,460,950	-152,319,130
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1,307,946,601	-1,253,103,314
591111	Pengembalian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1,307,946,601	-1,253,103,314
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-531,671,905	-531,671,906
591211	Pengembalian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-531,671,905	-531,671,906
522111	Beban Langganan Listrik	-18,429,607	0
522111	Pengembalian Beban Langganan Listrik	-18,429,607	0
522112	Beban Langganan Telepon	-5,138,665	-5,122,200
522112	Pengembalian Beban Langganan Telepon	-5,138,665	-5,122,200
522113	Beban Langganan Air	0	0
522113	Pengembalian Beban Langganan Air	0	0
522141	Beban Sewa	-118,400,000	-51,605,000
522141	Pengembalian Beban Sewa	-118,400,000	-51,605,000
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	-37,189,010	-165,217,620
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	-37,189,010	-165,217,620
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-640,000	0
524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-640,000	0
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	0	0
592222	Pengembalian Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	0	0
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
522192	Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-275,082,076	-179,074,400
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
521131	Pengembalian Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi	0	0
521211	Beban Bahan	-300,000	0
521211	Pengembalian Beban Bahan	-300,000	0
593111	Beban Persediaan konsumsi	-28,616,200	-30,125,800
593111	Pengembalian Beban Persediaan konsumsi	-28,616,200	-30,125,800
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-7,492,550	-7,412,310
593113	Pengembalian Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-7,492,550	-7,412,310
521111	Beban Keperluan Perkantoran	-469,928,800	-534,756,800
521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	-469,928,800	-534,756,800
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	-3,105,000
521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	-3,105,000
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	-650,000	0
521252	Pengembalian Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	-650,000	0
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-1,829,600	-3,077,500
521114	Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-1,829,600	-3,077,500
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-52,200,000	-39,141,400
521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-52,200,000	-39,141,400
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	0	-720,000
521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	-720,000
JUMLAH		-18,414,463,476	-11,219,823,974

DAFTAR JURNAL BMN DAN PERSEDIAAN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Kode Lap : CALK.BMN
 Tanggal : 06/05/26 4:45 PM
 Prg ID : calk_bmn_satker_poc

117113 Bahan untuk Pemeliharaan

KDSATKER	JNSDOK1	TRN_BMN			RPHREAL
005.01.401968	406 JRNBMN	K01	Habis Pakai		(7,492,550)
005.01.401968	406 JRNBMN	M02	Pembelian		10,288,900
005.01.401968	999 SAWAL	999	Saldo Awal		427,650
TOTAL					3,224,000

RINCIAN KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025

calc_ipo_akun_sabhar_poc

Akun	Uraian	2025	2024
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	401,037
JUMLAH		0	401,037

RINCIAN EKUITAS AKHIR TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025

calc_fpe_akun_satker_poc

Akun	Uraian	2025	2024
313111	Ditagikan ke Entitas Lain	6,141,709,995	3,826,310,747
313121	Diterima dari Entitas Lain	-584,500	0
313211	Transfer Keluar	0	0
313221	Transfer Masuk	80,010,000	7,000,000
391111	Ekuitas	27,692,750,778	29,468,950,981
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	401,037
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	560,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	560,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	24,500	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	24,500	0
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0
511111	Beban Gaji Pokok PNS	-1,131,044,900	-917,148,160
511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	-1,131,044,900	-917,148,160
511125	Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	-5,214,836	-175,009,724
511126	Beban Tunj. Beras PNS	-47,217,840	-39,106,800
511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	-47,217,840	-39,106,800
511129	Beban Uang Makan PNS	-190,179,000	-142,581,000
511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-190,179,000	-142,581,000
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	-16,470	-12,243
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-16,470	-12,243
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-58,916,986	-48,530,870
511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-58,916,986	-48,530,870
511122	Beban Tunj. Anak PNS	-13,956,038	-13,385,810
511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	-13,956,038	-13,385,810
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	-40,320,000	-40,320,000
511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	-40,320,000	-40,320,000
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	-52,485,000	-1,195,100,000
511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	-52,485,000	-1,195,100,000
511125	Beban Tunj. PPh PNS	-5,214,836	-175,009,724
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	-10,290,000	-9,365,000
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-10,290,000	-9,365,000
511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	-136,350,000	-72,900,000
511157	Pengembalian Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	-136,350,000	-72,900,000
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	-60,276,000	0
511611	Pengembalian Beban Gaji Pokok PPPK	-60,276,000	0
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	-1,716	0
511619	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PPPK	-1,716	0
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	-1,004,600	0
511621	Pengembalian Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	-1,004,600	0
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	-2,027,760	0
511625	Pengembalian Beban Tunjangan Beras PPPK	-2,027,760	0
511628	Beban Uang Makan PPPK	-17,745,000	0

511628	Pengembalian Beban Uang Makan PPPK	-17,745,000	0
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	-4,320,000	0
511633	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PPPK	-4,320,000	0
511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	-771,874,126	0
511324	Pengembalian Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	-771,874,126	0
511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	-3,652,600,000	0
511339	Pengembalian Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	-3,652,600,000	0
523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-275,082,076	-179,074,400
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-156,460,950	-152,319,130
523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-156,460,950	-152,319,130
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1,307,946,601	-1,253,103,314
591111	Pengembalian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1,307,946,601	-1,253,103,314
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-531,671,905	-531,671,906
591211	Pengembalian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-531,671,905	-531,671,906
522111	Beban Langganan Listrik	-18,429,607	0
522111	Pengembalian Beban Langganan Listrik	-18,429,607	0
522112	Beban Langganan Telepon	-5,138,665	-5,122,200
522112	Pengembalian Beban Langganan Telepon	-5,138,665	-5,122,200
522113	Beban Langganan Air	0	0
522113	Pengembalian Beban Langganan Air	0	0
522141	Beban Sewa	-118,400,000	-51,605,000
522141	Pengembalian Beban Sewa	-118,400,000	-51,605,000
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	-37,189,010	-165,217,620
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	-37,189,010	-165,217,620
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-640,000	0
524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-640,000	0
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	0	0
592222	Pengembalian Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	0	0
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
522192	Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-275,082,076	-179,074,400
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
521131	Pengembalian Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi	0	0
521211	Beban Bahan	-300,000	0
521211	Pengembalian Beban Bahan	-300,000	0
593111	Beban Persediaan konsumsi	-28,616,200	-30,125,800
593111	Pengembalian Beban Persediaan konsumsi	-28,616,200	-30,125,800
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-7,492,550	-7,412,310
593113	Pengembalian Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-7,492,550	-7,412,310
521111	Beban Keperluan Perkantoran	-469,928,800	-534,756,800
521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	-469,928,800	-534,756,800
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	-3,105,000
521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	-3,105,000
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	-650,000	0
521252	Pengembalian Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	-650,000	0
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-1,829,600	-3,077,500
521114	Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-1,829,600	-3,077,500
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-52,200,000	-39,141,400
521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-52,200,000	-39,141,400
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	0	-720,000
521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	-720,000
null	null	0	0
Jumlah		15,499,422,797	22,082,838,791

RINCIAN KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025

calc_lpe_akun_satker_poc

Akun	Uraian	2025	2024
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	6,141,709,995	3,826,310,747
313121	Diterima dari Entitas Lain	-584,500	0
313211	Transfer Keluar	0	0
313221	Transfer Masuk	80,010,000	7,000,000
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	401,037
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	560,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	560,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	24,500	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	24,500	0
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0
511111	Beban Gaji Pokok PNS	-1,131,044,900	-917,148,160
511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	-1,131,044,900	-917,148,160
511125	Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	-5,214,838	-175,009,724
511126	Beban Tunj. Beras PNS	-47,217,840	-39,106,800
511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	-47,217,840	-39,106,800
511129	Beban Uang Makan PNS	-190,179,000	-142,581,000
511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-190,179,000	-142,581,000
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	-16,470	-12,243
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-16,470	-12,243
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-58,916,986	-48,530,870
511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-58,916,986	-48,530,870
511122	Beban Tunj. Anak PNS	-13,956,038	-13,385,810
511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	-13,956,038	-13,385,810
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	-40,320,000	-40,320,000
511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	-40,320,000	-40,320,000
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	-52,485,000	-1,195,100,000
511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	-52,485,000	-1,195,100,000
511125	Beban Tunj. PPh PNS	-5,214,838	-175,009,724
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	-10,290,000	-9,365,000
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-10,290,000	-9,365,000
511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	-136,350,000	-72,900,000
511157	Pengembalian Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	-136,350,000	-72,900,000
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	-60,276,000	0
511611	Pengembalian Beban Gaji Pokok PPPK	-60,276,000	0
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	-1,716	0
511619	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PPPK	-1,716	0
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	-1,004,600	0
511621	Pengembalian Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	-1,004,600	0
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	-2,027,760	0
511625	Pengembalian Beban Tunjangan Beras PPPK	-2,027,760	0
511628	Beban Uang Makan PPPK	-17,745,000	0
511628	Pengembalian Beban Uang Makan PPPK	-17,745,000	0

511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	-4,320,000	0
511633	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PPPK	-4,320,000	0
511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	-771,874,128	0
511324	Pengembalian Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	-771,874,128	0
511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	-3,652,600,000	0
511339	Pengembalian Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	-3,652,600,000	0
523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-275,082,076	-179,074,400
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-156,460,950	-152,319,130
523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-156,460,950	-152,319,130
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1,307,946,601	-1,253,103,314
591111	Pengembalian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1,307,946,601	-1,253,103,314
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-531,671,905	-531,671,906
591211	Pengembalian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-531,671,905	-531,671,906
522111	Beban Langganan Listrik	-18,429,607	0
522111	Pengembalian Beban Langganan Listrik	-18,429,607	0
522112	Beban Langganan Telepon	-5,138,665	-5,122,200
522112	Pengembalian Beban Langganan Telepon	-5,138,665	-5,122,200
522113	Beban Langganan Air	0	0
522113	Pengembalian Beban Langganan Air	0	0
522141	Beban Sewa	-118,400,000	-51,605,000
522141	Pengembalian Beban Sewa	-118,400,000	-51,605,000
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	-37,189,010	-185,217,620
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	-37,189,010	-185,217,620
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-640,000	0
524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-640,000	0
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	0	0
592222	Pengembalian Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	0	0
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
522192	Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-275,082,076	-179,074,400
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
521131	Pengembalian Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi	0	0
521211	Beban Bahan	-300,000	0
521211	Pengembalian Beban Bahan	-300,000	0
593111	Beban Persediaan konsumsi	-28,616,200	-30,125,800
593111	Pengembalian Beban Persediaan konsumsi	-28,616,200	-30,125,800
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-7,492,550	-7,412,310
593113	Pengembalian Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-7,492,550	-7,412,310
521111	Beban Keperluan Perkantoran	-469,928,800	-534,756,800
521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	-469,928,800	-534,756,800
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	-3,105,000
521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	-3,105,000
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	-650,000	0
521252	Pengembalian Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	-650,000	0
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-1,829,600	-3,077,500
521114	Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-1,829,600	-3,077,500
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-52,200,000	-39,141,400
521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-52,200,000	-39,141,400
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	0	-720,000
521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	-720,000
null	null	0	0
Jumlah		-12,193,327,981	-7,386,112,190

RINCIAN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025

calc_lpe_akun_satker_poc

Akun	Uraian	2025	2024
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	6,141,709,995	3,826,310,747
313121	Diterima dari Entitas Lain	-584,500	0
313211	Transfer Keluar	0	0
313221	Transfer Masuk	80,010,000	7,000,000
JUMLAH		6,221,135,495	3,833,310,747

DAFTAR JURNAL BMN DAN PERSEDIAAN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Kode Lap : CALK.BMN
 Tanggal : 06/05/26 4:45 PM
 Prg ID : calk_bmn_satker_poc

117111 Barang Konsumsi

KDSATKER	JNSDOK1	TRN_BMN			RPHREAL
005.01.401968	406 JRNBMN	K01	Habis Pakai		(28,616,200)
005.01.401968	406 JRNBMN	M02	Pembelian		42,537,640
005.01.401968	999 SAWAL	999	Saldo Awal		2,174,800
TOTAL					16,096,240

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
Wilayah : 3000 Bangka Belitung
Satuan Kerja : 401968 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
No. Dokumen : 001
Tanggal : 31 Desember 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Jurnal Akrual Belanja Pajak Penghasilan Pejabat Negara

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Dimuka
- ☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Belanja Dibayar Dimuka
- ☒ Belanja yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- ☐ Penyusutan dan Amortisasi
- ☐ Persediaan
- ☐ Uang Muka Belanja
- ☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
- ☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang
- ☐ Kas di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- ☐ Persekot Gaji
- ☐ Selisih Kurs
- ☐ Transfer
- ☐ Reklasifikasi
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Koreksi Lainnya
- ☐ RPATA

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	511324	Beban Tunj PPh pejabat negara	401.307.320	-
	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	401.307.320

Direkam Tanggal : 31 Desember 2025

Operator SAKTI

Fanny Ruspanji

Disetujui
Kuasa Pengguna Anggaran



Dora Natalia Singarimbun

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

DAFTAR
UNTUK PARA PEGAWAI
GOL. III GOL. IV

PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO DAFTAR GAJI
000319
TEMPAT PEMBAYARAN SP2D
KPPN PANGKAL PINANG

DI PANGKALPINANG
PEMBAYARAN KERURANGAN GAJI HAKIM

RUANGAN DISEDIAKAN UNTUK CATATAN-CATATAN PEMBUAT DAFTAR GAJI BERSANGKUTAN

PENDHASILAN		
1. GAJI POKOK	Rp.	0
2. TUNJANGAN ISTRISUAMI	Rp.	0
3. TUNJANGAN ANAK	Rp.	0
4. TUNJANGAN LAIN-LAIN (PERBAIKAN PENGHASILAN)	Rp.	0
5. TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL	Rp.	0
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	Rp.	0
TUNJANGAN FUNGSIONAL LAIN	Rp.	1.317.600.000
6. TUNJANGAN UMUM	Rp.	0
7. TUNJANGAN TAMBAHAN UMUM	Rp.	0
8. TUNJANGAN PAPUA	Rp.	0
9. TUNJANGAN WILAYAH TERPENCIL	Rp.	0
10. TUNJANGAN BERAS	Rp.	0
10. TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN		
11. PEMBELITAN		
Jumlah Bruto		Rp. 1.317.600.000
Jumlah Bersih		Rp. 401.307.320
Jumlah Kotor		Rp. 0
Potongan		Rp. 1.718.907.320
1. PFK BERAS	Rp.	0
2. SIMPANAN WAJIB	Rp.	0
3. BPJS	Rp.	0
4. BPJS KELUARGA YG LAIN	Rp.	0
5. SEWA RUMAH	Rp.	0
6. TUNGGAHAN	Rp.	0
7. HUTANG KELEBIHAN	Rp.	0
8. LAIN-LAIN	Rp.	0
9. PAJAK PENGHASILAN	Rp.	401.307.320
10. TABUNGAN PERUMAHAN	Rp.	0
Jumlah Potongan		Rp. 401.307.320
Jumlah Bersih		Rp. 1.317.600.000

SATU MILYAR TIGA RATUS TUJUHBELAS JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH

DAFTAR GAJI YANG DIBUAT TELAH BERDASARKAN PERHITUNGAN YANG SEBENARNYA, APABILA TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BERSEDIYA MENYETORKAN KE REKENING KAS NEGARA

Jumlah PNS dan Keluarga				
NO.	GOL	Jumlah PNS	ISTRISUAMI	ANAK
1.	IV	3	1	2
2.	III	8	6	5
3.	II	0	0	0
4.	I	0	0	0
Jumlah		11	7	7
				25

DIBUAT UNTUK LEMBAR ASLI KEDUA
PANGKALPINANG, 31 Maret 2026

(KONSEP)

MENGETAHUI/MENYETUJUI

(EMPTY)

(EMPTY)

PEMBAYARAN : KEKURANGAN GAJI HAKIM

LEMBAR KE : 1

NO. LRT	NAMA TANGGAL LAHIR NIP.	STA. KAWIN JML. ANAK	GAJI PONDOK TUN KELUARGA A. STRUKTUR E. ANAK	TUN. UMUM TAMBAH UMUM TUN. PAKIA TUN. TERPERCERAI	PENGHASILAN				POTONGAN					JUMLAH BERSIH YANG DIBAYARKAN	TANDA TANGAN
					TUNJ. JABATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL LAINLAIN PEMBULATAN	TUNJ. BERAS	TUNJ. KHUSUS PAJAK	JUMLAH PENGG. KOTOR	POT. BERAS	IWP BPJS BPJS LAIN	PAJAK PENGRA SILAI	SEWA RMH TUNGGAHAN UTANG LEBIH POT. LAIN TAPERUM	JUMLAH POTONGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	KEKURANGAN GAJI HAKIM	(3 X)	1102	0	0	0	40.073.346	178.373.346	0	0	40.073.346	0	40.073.346	138.300.000	033801002388607
	KEKURANGAN GAJI HAKIM	(3 X)	1000	0	0	0	37.939.688	163.639.688	0	0	37.939.688	0	37.939.688	126.700.000	005901003205258
	KEKURANGAN GAJI HAKIM	(3 X)	1000	0	0	0	34.071.444	147.771.444	0	0	34.071.444	0	34.071.444	113.700.000	005801003340501
1.	FEBRIANSYAH ROZARIUS, SH LIR 11-02-1982 NIP.198202112017121003 PNS GOL.III/B	1101	3.287.000 328.700 65.740 3.681.440	0	0	0	0	61.948.715	0	294.515 120.000 0	0	0	414.515	61.534.200	005971004655555
	NIP.199202112017121003	1101	3.287.000 328.700 65.740 3.681.440	0	0	0	0	23.048.715	0	294.515 120.000 0	0	0	414.515	22.634.200	00380100485555555
	NIP.198202112017121003	1101	0 0 0 0	0	0	0	0	36.900.000	0	0 0 0 0	0	0	0	38.900.000	
	Jumlah Lembar ke : 1	3 1 2 6	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	112.034.488	489.784.488	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	112.084.488	377.700.000	

MAHKAMAH AGUNG

DAFTAR GAJI PEGAWAI GOLONGAN III
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SATKER / NOMOR GAJI : 401966 / 000319

PEMBAYARAN : KEKURANGAN GAJI HAKIM

LEMBAR KE : 2

NO. URUT	NAMA TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI GOLONGAN	STA. KAWIN JAWA ASIA JAWA	PENGHASILAN				JUMLAH PEKOH KOTOR	TUNJ. KHUSUS PAJAK	POT. BERAS	POTONGAN					JUMLAH BERSIH YANG DIHAYANKAN	TANDA TANGKAP
			GAJI POKOK TUNJ. KELUAR A. ISTRIS/ANAK B. ANAK	TUNJ. UMUM TAMBAH UMUM TUNJ. PAPUA TV. TERPENCIL	TUNJ. JABATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL LAHILAIN PEMULATAN	TUNJ. BERAS										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	KEKURANGAN GAJI HAKIM	1101	0	0	0	0	36.014.918	152.714.518	0	0	36.014.918	0	36.014.918	116.700.000	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	AUDREY KARTIKA PUTRI, S.H. LHR.22.12-1989 NIP.19941222202032006 PNS GOL III/a	1000	2.873.500	0	0	72.420	0	59.995.950	0	229.880	0	0	540.880	59.546.100	711801007185532	1
			0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
	NIP.19991222202032006	1000	2.873.500	0	0	72.420	0	20.793.950	0	229.880	0	0	340.880	20.446.100	711801007185532	0
			0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
	NIP.19881222202032006	1000	2.873.500	0	0	0	0	38.200.000	0	0	0	0	0	39.200.000	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KEKURANGAN GAJI HAKIM	1000	0	0	0	0	36.152.478	153.752.478	0	0	36.152.478	0	36.152.478	117.600.000	711801007185532	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NURANISYAH, S.H. LHR.15-01-1954 NIP.19540115202032007 PNS GOL III/a NPWP810054347118000	1100	2.873.500	0	0	144.840	0	60.355.765	0	252.880	0	0	372.880	59.982.000	7211942187	0
			287.350	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Lembar ke - 2	4	3.160.850	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Lembar ke - 2	4	0	0	0	0	0	308.467.398	0	0	72.167.385	0	72.167.385	234.300.000	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PENYAYARAN : KEKURANGAN GAJI HAKIM

LEMBAR KE : 3

NO. URT	NAMA TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI GOLONGAN	BTA KAWIN JML ANAK JIWA	PENGHASILAN					POTONGAN					JUNJAH BERSIH YANG DIBAYARKAN	TAMBA TANGAN	
			GAJI POKOK TUN KELUARDA A. ISTIRISUAH B. ANAK	TUN UMUM TAMBAH UMUM TUNJ PAKIA TW TERPEHOL PEMBELAJAN	TUNJ BERSH	TUNJ KHUSUS PAJAK	JUNJAH PENGH KOTOR	POT. BERSH	IVP BPJS BPJS LAH	PAJAK PENGHA SILAN	BEWA RMH TUNGGAKH UTANG LEBH POT. LAH TAPERUM	JUNJAH POTONGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	NIP.1994011520220323007	1100	2.873.500 287.350 0 3.160.850	0 0 0 0	0 16.500.000 1.350.000 78	144.840 0 0 0	0 0 0 0	21.155.768 0 39.200.000 0	0 0 0 0	252.808 120.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	372.868 0 0 0	20.782.900 0 39.200.000 0	7211042187
	NIP.199401152022032507	1100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 39.200.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	39.200.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	KEKURANGAN (3 X 1) GAJI HAKIM	1100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 117.600.000 0 0	0 0 0 0	36.174.314 0 0 0	153.774.314 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	36.174.314 0 0 0	0 0 0 0	36.174.314 0 0 0	117.600.000 0 0 0	7211042187
4.	MEIMAN ELIESER, S.H LHR.05-05-1994 NIP.199405052022031006 PNS GOL III/9 NPWP63848446632000	1101	2.873.500 287.350 57.470 3.218.320	0 0 0 0	0 55.700.000 1.350.000 65	217.260 0 0 0	0 0 0 0	60.485.665 0 21.285.665 0	0 0 0 0	257.465 120.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	377.465 0 0 0	50.108.200 0 20.988.200 39.200.000	7206724123
	NIP.199405052022031008	1101	2.873.500 287.350 57.470 3.218.320	0 0 0 0	0 16.500.000 1.350.000 85	217.260 0 0 0	0 0 0 0	21.285.665 0 39.200.000 0	0 0 0 0	257.465 120.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	377.465 0 0 0	20.988.200 0 39.200.000 0	7206724123
	NIP.199405052022031006	1101	0 0 0 0	0 0 0 0	0 39.200.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	39.200.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	JUMLAH LEMBAR KE - 3	1 1 0 2	0 0 0 0	0 0 0 0	0 117.900.000 0 0	0 0 0 0	36.174.314 0 0 0	153.774.314 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	36.174.314 0 0 0	0 0 0 0	36.174.314 0 0 0	117.600.000 0 0 0	

PEMBAYARAN : KEKURANGAN GAJI HAKIM

NO. URUT	NAMA TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI GOLONGAN	STA. KAWIN JAWA ANAK JAWA	PENDAPATAN						POTONGAN						Jumlah BERSIH YANG DIBAYARKAN	TAMBAH TANGAN
			GAJI POKOK TUNJ. KELUAR A. ISTIRAHAT B. ANAK	TUNJ. UMUM TAMBAH UMUM TUNJ. PAPUA TW TERPERCILI	TUNJ. ADAT STRUKTURAL FUNGSIONAL LAIN-LAIN PEMBULATAN	TUNJ. BERAS	TUNJ. KHUSUS PAJAK	Jumlah PENGH KOTOR	POT. BERAS	RPP BPJS BPJS LAH	PAJAK PENGHA SILAN	SEWA RMH TUNGGALAH UTANG LEBIH POT. LAH TAPERUM	Jumlah POTONGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5.	KEKURANGAN GAJI HAKIM RAKA PRAYOGA PUTRA PRATAMA, SH LHR.05-12-1986 NIP.199612052022031007 PNS GOL.III/a	1101	0	0	0	0	36.182.161	153.782.161	0	0	36.182.161	0	36.182.161	117.600.000	72.067.5423	4.
			2.873.500	0	0	217.260	0	60.485.665	0	257.465	0	0	377.465	60.106.200	115.591.029719537	
			267.350	0	55.700.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	
			57.470	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3.218.320	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	KEKURANGAN GAJI HAKIM FERIO WABARCA HUTABARAT, S.H LHR.19-01-1986 NIP.198601192022031004 PNS GOL.III/a	1101	0	0	0	0	36.182.161	153.782.161	0	0	36.182.161	0	36.182.161	117.600.000	186.601.086713607	5.
			2.873.500	0	0	217.260	0	60.485.665	0	257.465	0	0	377.465	60.106.200	71.639.665	
			267.350	0	55.700.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	
			57.470	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3.218.320	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah Lembar ke 4		2 2 2 6	0	0	0	0	72.364.322	307.564.322	0	0	72.364.322	0	72.364.322	235.200.000		
			0	0	235.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PEMBAYARAN : KEKURANGAN GAJI HAKIM

LEMBAR KE : 6

NO. URUT	NAMA TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI GOLONGAN	STA. KAWIN JML ANAK JAWA	PENDAHASILAN										POTONGAN					Jumlah Bergaji yang dibayarkan	Tanda Tangan
			GAJI POKOK TUNJ KELUARGA A. ISTRI/SUAMI B. ANAK	TUNJ LUMBU TAMBAT LUMBU TUNJ PAKIA TW TERPERCILI	TUNJ JABATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL LAIN LAIN PEMBULATAN	TUNJ BERAS	TUNJ KHUSUS PAJAK	Jumlah Bergaji Kotor	POT. BERAS	KWP BPJS BPJS LAIN	PAJAK PENDAHT SILAH	SEWA RMH TUNGGARAN UTANG LEBIH POT. LAIN TAPERUM	Jumlah Potongan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	KEKURANGAN GAJI HAKIM	1100	0 0 0 0	0 0 0 0	117.600.000 0 0 0	0	36.182.161	153.782.161	0	0	36.182.161	0	36.182.161	117.600.000	734375016				
B.	REGINA LOIS PRISODILLA SIPAHUTAR, S.H. LHR.24-07-1998 NIP.185607242022032013 PNS GOLONGAN	1000	2.673.500 0 0 2.673.500	0 0 0 0	55.700.000 1.350.000 60	72.420	0	58.585.980	0	229.880 120.000 0	0	0	349.880	58.545.100	132561003235588				
	NIP.185607242022032013	1000	2.673.500 0 0 2.673.500	0 0 0 0	16.500.000 1.350.000 60	72.420	0	20.795.980	0	229.880 120.000 0	0	0	349.880	20.448.100	132561003235588				
	NIP.190507242022032013	1000	0 0 0 0	0 0 0 0	29.200.000 0 0 0	0	0	39.200.000	0	0 0 0	0	0	0	39.200.000					
	KEKURANGAN GAJI HAKIM	1000	0 0 0 0	0 0 0 0	117.600.000 0 0 0	0	36.152.478	153.752.478	0	0	36.152.478	0	36.152.478	117.600.000	132901003521506				
	Jumlah Lembar Ke : 6	2 1 1 4	0 0 0 0	0 0 0 0	0 235.200.000 0 0	0	72.334.639	397.534.639	0	0 0 0	72.334.639	0	72.334.639	235.200.000					

PENBAYARAN : KEKURANGAN GAJI HAKIM

LEMBAR KE : 7

NO. URUT	NAMA TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI GOLONGAN	BTA KAWIN JMLH ANAK JIWA	GAJI POKOK TUNJ KELUARGA A. ISTRESUAMI B. ANAK	PENGHASILAN					POTONGAN					JMLAH BERSIH YANG DIBAYARKAN	TAMBA TANGAN
				TUNJ. UMUM TAMBAH TUNJ. TUNJ. PAPUA TUNJ. TERPENCIL	TUNJ. JABATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL LAIN-LAIN PENGULATAN	TUNJ. BERAS	TUNJ. KHUSUS PAJAK	JMLAH PERKH KOTOR	POT. BERAS	IWP BPJS BPJS LAIN	PAJAK PENGHA SILAN	SEWA RUMAH TUNGGAKAN UTANG LEBIH POT. LAIN TAKSIRUM	JMLAH POTONGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG															
		11	0	0	0	0	401.307.320	1.715.907.320	0	0	401.307.320	0	401.307.320	1.317.600.000	
		7	0	0	1.317.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PANGKALPINANG , 31 Maret 2026

(KONSEP)

NO. URT	NAMA TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI GOLONGAN	STA. KAWIN JAL ANAK JIWA	PENDHASILAN							POTONGAN					JUMLAH BERSIH YANG DIBAYARKAN		
			GAJI POKOK TUN KELUARGA A. ISTRI/UMI B. ANAK	TUN. UMUM TAMU T. UMUM TUNJ. PAPUA NW. TENPENCIL	TUNJ. JABATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL LAIN-LAIN PEMBELUTAN	TUNJ. BERAS	TUNJ. KHUSUS PAJAK	JUMLAH PENGGH. KOTOR	POT. BERAS	NIP. BPJS BPJS LAIN	PAJAK PENGH. SIJAH	SEWA ROK TUNGGAKAN UTANG LEBIH POT. LAIN TAPERUK	JUMLAH POTONGAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	LEMBAR 1	3	0	0	0	0	112.084.488	489.764.488	0	0	112.084.488	0	112.084.488	377.700.000			
		1	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
		2	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
		6	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
	LEMBAR 2	2	0	0	0	0	72.167.396	306.467.396	0	0	72.167.396	0	72.167.396		234.300.000		
		1	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
		1	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
		4	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
	LEMBAR 3	1	0	0	0	0	36.174.314	150.774.314	0	0	36.174.314	0	36.174.314				117.600.000
		1	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
		2	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
	LEMBAR 4	2	0	0	0	0	72.364.322	307.564.322	0	0	72.364.322	0	72.364.322				235.200.000
		2	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
		2	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
		6	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
	LEMBAR 5	1	0	0	0	0	36.182.161	150.782.161	0	0	36.182.161	0	36.182.161				117.600.000
		1	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
		1	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
		3	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
	LEMBAR 6	2	0	0	0	0	72.334.639	307.534.639	0	0	72.334.639	0	72.334.639				235.200.000
		1	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
		1	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
		4	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
	HALAMAN : 1	11	0	0	0	0	401.307.320	1.718.807.320	0	0	401.307.320	0	401.307.320				1.317.600.000
		7	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
		7	0	0	0	0			0	0	0	0	0				
		25	0	0	0	0						0	0				

NO. URUT	NAMA: TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI GOLONGAN	STA. KAWIN JUL / ANAK JAWA	PENGHASILAN						POTONGAN					JUMLAH BERSIH YANG DIAYARKAN
			GAJI POKOK TUN KELUARGA A. ISTIRISUAI B. ANAK	TUN UMUR TAMU T. UMUR TUNJ. PAPUA TW. TERPERCI	TUNJ. JABATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL LAIN-LAIN PENSIUNATAN	TUNJ. BERAS	TUNJ. KHUSUS PAJAK	JUMLAH PENGCH KOTOR	POT. BERAS	IRP BPJS BPJL LAIN	PAJAK PENGCH SIAH	SEWA BAH TUNGGAKAN UTANG LEBIH POT. LAIN TAPERUKA	JUMLAH POTONGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HALAMAN: 2	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0
	TOTAL	11 7 7 25	0 0 0 0	0 0 0 0	1.317.600.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1.718.937.320	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	401.307.320	1.317.600.000

PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI HAKIM

LEMBAR KE - 2

NO. URUT	NAMA, TANGGAL LAHIR, NIP, STATUS PEGAWAI GOLONGAN	STA. KAWIN JULU AHAK JAWA	GAJI POKOK, TUNJELUANG A, (STRUKSAMI) B, ANAK	TUNJ. UMUM	TAMBAH TUNJ. TUNJ. PAKSI TW, TERPERENCIL	PENGHASILAN					POTONGAN					Jumlah Bersih yang Dibayarkan	TANDA TANGAN
						TUNJ. JABATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL LAIN LAIN	TUNJ. BERAS	TUNJ. KURUS PAJAK	Jumlah Pengh. Motor	POT. BERSI	BPJS	POT. BERSI	POT. BERSI	POT. BERSI	POT. BERSI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	NIP-197702172003122001	1000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	41.900.000	0	0	0	41.900.000	0	0	0	0	0	0	41.900.000	
	KEKURANGAN GAJI HAKIM (3 X)	1000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	125.700.000	0	0	37.939.698	163.639.698	0	0	0	0	0	0	125.700.000	2
3	FITRI WAHYUNINGTYAS SH LHR.22-07-1982 NIP.106207222006052001 PNS GOLONGAN IV	1000	4.213.500 0 0 0 0	0 0 0 0 0	59.700.000 1.350.000 60	72.420	0	0	65.335.980	0	337.080 120.000	0	0	0	0	64.878.950	0000010003348501
	KEKURANGAN GAJI HAKIM (3 X)	1000	4.213.500 0 0 0 0	0 0 0 0 0	21.800.000 1.350.000 60	72.420	0	0	27.435.980	0	337.080 120.000	0	0	0	0	26.978.900	0000010003348501
	KEKURANGAN GAJI HAKIM (3 X)	1000	4.213.500 0 0 0 0	0 0 0 0 0	37.900.000	0	0	0	37.900.000	0	0	0	0	0	0	37.900.000	
	KEKURANGAN GAJI HAKIM (3 X)	1000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	113.700.000	0	0	34.071.444	147.771.444	0	0	0	0	0	0	113.700.000	0000010003348501
	Jumlah Lembar ke - 2	2	0 0 0 0	0 0 0 0	239.400.000	0	0	72.011.142	311.411.142	0	0	0	0	0	0	239.400.000	

PENYAYARAN : KEKURANGAN GAJI HAKIM

NO. URUT	NOMOR TANGKAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI GOLONGAN	STA. KAWIN GILI ANAK JIWA	PENGHASILAN						POTONGAN					JUMLAH BERSIH YANG DIBAYARKAN	TANDA TANGAN
			GAJI POKOK TUNJ KELUARGA A. ISTRIS/UMI B. ANAK	TUNJ. UMUM TAMBAH UMUM TUNJ. PAPA TW TERPERCILI	TUNJ. JABATAN STRUKTURAL Fungsional LAH-LAIN PEMULATAN	TUNJ. BERAS	TUNJ. KHUSUS PAJAK	JUMLAH PENGH KOTOR	POT. MERAS	TWP BPJE BPJS LAIN	PAJAK PENGH DILAN	SEWA RUM TUNGGAHAN UTANG LEBIH POT. LAIN TAPERUM	JUMLAH POTONGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	KEKURANGAN (3 X) GAJI HAKIM	1101	0 0 0 0	0 0 0 0	0 116.700.000 0 0	0	36.014.918	162.714.918	0	0 0 0 0	36.014.918	0	36.014.918	116.700.000	08390100435505
	KEKURANGAN (3 X) GAJI HAKIM	1000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 117.600.000 0 0	0	36.152.478	163.752.478	0	0 0 0 0	36.152.478	0	36.152.478	117.600.000	71460160718532
	KEKURANGAN (3 X) GAJI HAKIM	1100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 117.600.000 0 0	0	36.174.314	163.774.314	0	0 0 0 0	36.174.314	0	36.174.314	117.600.000	7211642187
	KEKURANGAN (3 X) GAJI HAKIM	1101	0 0 0 0	0 0 0 0	0 117.600.000 0 0	0	36.182.161	163.782.161	0	0 0 0 0	36.182.161	0	36.182.161	117.600.000	7266735123
	KEKURANGAN (3 X) GAJI HAKIM	1101	0 0 0 0	0 0 0 0	0 117.600.000 0 0	0	36.182.161	163.782.161	0	0 0 0 0	36.182.161	0	36.182.161	117.600.000	145501600719507
	KEKURANGAN (3 X) GAJI HAKIM	1101	0 0 0 0	0 0 0 0	0 117.600.000 0 0	0	36.182.161	163.782.161	0	0 0 0 0	36.182.161	0	36.182.161	117.600.000	145501600719507
	JUMLAH LEMBAR KE : 3	6 5 4 15	0 0 0 0	0 0 0 0	0 704.700.000 0 0	0	216.888.193	921.588.193	0	0 0 0 0	216.888.193	0	216.888.193	704.700.000	

MAKAMAH AGUNG

DAFTAR GAJI PEGAWAI GOLONGAN IV
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SATKER / NOMOR GAJI : 401968 / 000319

LEMBAR KE : 2

PEMBAYARAN : KEKURANGAN GAJI HAKIM

NO. URUT	NAMA, TANGGAL LAHIR, RUP, STATUS PEGAWAI, GOLONGAN	STA. KAWIN, JML. ANAK, JIWA	GAJI POKOK, TUNJ. KELUARGA, A. ISTRIS/RUAMI, B. ANAK	TUNJ. UMUM, TAMBAH UMUM, TUNJ./PAJAK, TW, TERPENCIL	PENDHABILAN				POTONGAN						JUMLAH BERSIH YANG DIBAYARKAN	TANDA TANGAN
					TUNJ. JABATAN STRUKTURAL, FUNKSIONAL, LAINLAIN, PEMBELATAN	TUNJ. BERAS	TUNJ. KHUSUS PAJAK	JUMLAH PENGH. KOTOR	POT. BERAS	MP. BPJS, BPJS LAIN	PAJAK PENGH. SILAH	SEWA RUM. TUNGGAL, LAIN, UTANG, LAIN, POT. LAIN, TAPERUM	JUMLAH POTONGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	KEKURANGAN GAJI HAKIM (3 X)	1101	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 117.600.000 0 0 0 0	0 36.182.161	153.782.161	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 36.182.161	0 0 0 0	36.182.161	117.600.000	724775818	
	KEKURANGAN GAJI HAKIM (3 X)	1000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 117.600.000 0 0 0 0	0 36.152.478	153.752.478	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 36.152.478	0 0 0 0	36.152.478	117.600.000	13581063320596	
	JUMLAH LEMBAR KE 4	2 1 1 4	0 0 0 0	0 0 0 0	0 235.200.000 0 0 0	0 72.334.639	307.534.639	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 72.334.639	0 0 0 0	72.334.639	235.200.000		
	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	11 7 7 25	0 0 0 0	0 0 0 0	0 1.317.600.000 0 0 0	0 401.307.320	1.716.907.320	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 401.307.320	0 0 0 0	401.307.320	1.317.600.000		

PANGKALPINANG , 31 Maret 2026

(KONSEP)

NO. URT	TAMA TANGGAL LAHR NIK STATUS PECAWAI GOLONGAN	STA. KAWIN JML. ANAK JWA	PENGHASILAN							POTONGAN					JUMLAH BERSIH YANG DIBAYARKAN
			GAJI POKOK, TUN KELUARHA A. ISTRIBUAMI B. ANAK	TUN. UMUM TAMBUK. T. UMUM TUNJ. PAHUA TW. TERPENCIL	TUNJ. JABATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL LAIN-LAIN PEMELILATAN	TUNJ. BERA BERAS	TUNJ. KHURUS PAJAK	JUMLAH PENGH KOTOR	POT. BERAS	WTP BPJS BPJS LAIN	PAJAK PENGHA SILAI	SEWARUK TUNGGAN UTANG LEBIH POT. LAIN TAPERUM	JUMLAH POTONGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	LEMBAR 1	1 1 2 4	0 0 0 0	0 0 0 0	0 138.300.000 0 0	0 0 0 0	0 40.073.346 0	178.373.346	0	0 0 0	40.073.346	0 0 0 0	40.073.346	138.300.000	
	LEMBAR 2	2 0 0 2	0 0 0 0	0 0 0 0	0 239.400.000 0 0	0 0 0 0	0 72.011.142 0	311.411.142	0	0 0 0	72.011.142	0 0 0 0	72.011.142	239.400.000	
	LEMBAR 3	0 5 4 15	0 0 0 0	0 0 0 0	0 704.700.000 0 0	0 0 0 0	0 216.888.193 0	921.588.193	0	0 0 0	216.888.193	0 0 0 0	216.888.193	704.700.000	
	LEMBAR 4	2 1 1 4	0 0 0 0	0 0 0 0	0 235.200.000 0 0	0 0 0 0	0 72.334.639 0	307.534.639	0	0 0 0	72.334.639	0 0 0 0	72.334.639	235.200.000	
	HALAMAN : 1	11 7 7 25	0 0 0 0	0 0 0 0	0 1.317.600.000 0 0	0 0 0 0	0 401.307.320 0	1.718.907.320	0	0 0 0	401.307.320	0 0 0 0	401.307.320	1.317.600.000	
	TOTAL	11 7 7 25	0 0 0 0	0 0 0 0	0 1.317.600.000 0 0	0 0 0 0	0 401.307.320 0	1.718.907.320	0	0 0 0	401.307.320	0 0 0 0	401.307.320	1.317.600.000	



PANGKALPINANG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025 (AUDITED)

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

Pangkalpinang, 04 Mei 2026

Nomor : 105/SEK.PTUN.W5-TUN5/PL1.2.5/V/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 Dokumen
Hal : Penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2025 (Audited)

Kepada Yth:

Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

c.q. Biro Perlengkapan

Di Tempat

Dengan hormat,

Schubungan dengan surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 200/BUA-4/PL1.2.7/IV/2026 tanggal 24 April 2026 tentang Penyampaian LBKP, LBP-W, dan LBP-EI Tahun 2025 (Audited) pada Satuan Kerja di bawah Mahkamah Agung dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pengelolaan Barang Milik Negara, bersama ini kami sampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2025 (Audited) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**SEKRETARIS PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA PANGKALPINANG**
DORA NATALIA SINGARIMBUN

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
5. Sekretaris Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 200/BUA.4/PL1.2.7/IV/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian LBKP, LBP-W, dan LBP-E1
Tahun 2025 (*Audited*) pada Satuan Kerja
di bawah Mahkamah Agung

Jakarta, 24 April 2026

- Yth. 1. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi
2. Para Sekretaris Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI
3. Para Sekretaris Ditjen di Lingkungan Mahkamah Agung RI
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
di tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, seluruh Pelaksana Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI diwajibkan untuk menyusun Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang meliputi Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) untuk tingkat satuan kerja pengadilan (tingkat pertama dan tingkat banding), Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBP-W) untuk tingkat Koordinator Wilayah, Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBP-E1) untuk tingkat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung dan Laporan Barang Pengguna (LBP) untuk tingkat Kementerian/Lembaga.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-45/KN/KN.2/2026 tentang Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun 2025 *Audited*, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Satuan kerja wajib menyusun LBMN sesuai PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN dan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-3/KN/KN.2/2026 terkait penyampaian LBP pada K/L Tahun 2025, kemudian mengunggahnya melalui aplikasi e-SADEWA Mahkamah Agung pada menu Penatausahaan - LBKP paling lambat Kamis, 07 Mei 2026;
2. Petunjuk teknis penyusunan LBKP, LBP-W, dan LBP-E1 Tahun 2025 (*Audited*) dapat dilihat pada lampiran surat ini. Adapun untuk format LBKP, LBP-W, dan LBP-E1 Tahun 2025 (*Audited*) dapat diakses pada link berikut:
<https://bit.ly/FormatLBKPSatker>;

3. Penyampaian LBMN wajib dilaksanakan karena akan memengaruhi pencapaian target Indeks Pengelolaan Aset Satuan Kerja dan Mahkamah Agung serta mendukung penyampaian Laporan Keuangan Mahkamah Agung Periode Tahunan Tahun 2025 (*Audited*);
4. Apabila terdapat kendala dalam penyampaian laporan-laporan tersebut di atas, satuan kerja diminta untuk menghubungi Koordinator Wilayah dan/atau Pembina Wilayah masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih

Kepala Biro Perlengkapan,



Ditandatangani secara elektronik

Rosyidatus Syarifefini

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI.



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code atau melalui aplikasi BeSign atau Panter (<https://bsr.bssn.go.id/repository>).

LAMPIRAN

Surat Dinas Kepala Biro Perlengkapan BUA MA RI
Nomor : 200/BUA.4/PL1.2.7/IV/2026
Tanggal : 24 April 2026

Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP), Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBP-W), dan Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBP-EI) Untuk Satuan Kerja di Bawah Mahkamah Agung RI

Berikut ini adalah petunjuk teknis penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) untuk satker di bawah Mahkamah Agung **secara berurutan**. Untuk Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBP-W) dan Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBP-EI) dapat menyesuaikan sesuai dengan jenis laporannya.

A. Penyusunan LBKP (Full Form)

Format utuh (*full form*) LBKP adalah sebagai berikut:

1. Cover Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP)

Dibuat menyesuaikan nama satker dengan judul: Laporan Barang Kuasa Pengguna (Nama Satker) Tahun 2025 (*Audited*)

Contoh:

- a. Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tahun 2025 (*Audited*)
- b. Laporan Barang Pengguna Wilayah DKI Jakarta Tahun 2025 (*Audited*)
- c. Laporan Barang Pengguna Eselon I Badan Urusan Administrasi Tahun 2025 (*Audited*)

2. Kata Pengantar

Dibuat menyesuaikan dengan Template LBKP

3. Daftar Isi

Dibuat menyesuaikan dengan Template LBKP

4. Overview

Dibuat menyesuaikan dengan Template LBKP

Keterangan:

- a. Untuk Poin 2, data diambil dari Neraca BMN
- b. Untuk Poin 3, data diambil dari Laporan Persediaan
- c. Untuk Poin 4, terjadinya mutasi tambah silahkan dipilih nomornya (1-5); untuk jenis transaksi yang menyebabkan mutasi tambah dapat diambil dari Laporan CRBMN dan untuk total nilai mutasi tambah dapat diambil dari Laporan Barang Intrakomptabel
- d. Untuk Poin 5, terjadinya mutasi kurang silahkan dipilih nomornya (1-6); untuk jenis transaksi yang menyebabkan mutasi tambah dapat diambil dari Laporan CRBMN dan untuk total nilai mutasi tambah dapat diambil dari Laporan Barang Intrakomptabel

5. **Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA**
Berisi perbandingan nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh Operator Aset dan Persediaan, Operator GLP, dan diketahui oleh Sekretaris selaku KPB dan KPA.
Format Tabel Excel Bisa Diambil pada tautan berikut:
https://bit.ly/FormatL_BKPSatker
6. **Laporan Posisi BMN Di Neraca per 31 Desember 2025**
Laporan ini dapat diperoleh dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap pada menu Cetak – Laporan BMN, dengan rincian sebagai berikut:
Level laporan : SATKER
Jenis Laporan : Laporan Utama
Laporan : Laporan Posisi BMN di Neraca
Periode Sampai Dengan : 2025-14 (pilih periode saat laporan disusun)
Tipe File : PDF
7. **Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) – 01 Januari 2025**
Laporan ini dapat diperoleh dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap pada menu Cetak – Laporan BMN, dengan rincian sebagai berikut:
Level laporan : SATKER
Jenis Laporan : Laporan Utama
Laporan : Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
Periode Sampai Dengan : -
Tipe File : PDF
8. **Laporan Barang Persediaan**
Laporan ini dapat diperoleh dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap pada menu Cetak – Laporan BMN, dengan rincian sebagai berikut:
Level laporan : SATKER
Jenis Laporan : Laporan Tambahan
Laporan : Laporan Persediaan
Periode Sampai Dengan : 2025-14 (pilih periode saat laporan disusun)
Tipe File : PDF
9. **Laporan Barang Intrakomptabel**
Laporan ini dapat diperoleh dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap pada menu Cetak – Laporan BMN, dengan rincian sebagai berikut:
Level laporan : SATKER
Jenis Laporan : Laporan Utama
Laporan : Laporan Barang
Sub Laporan : Intrakomptabel
Rincian Barang : Sub-sub Kelompok
Periode Sampai Dengan : 2025-14 (pilih periode saat laporan disusun)
Tipe File : PDF
10. **Laporan Barang Ekstrakomptabel**
Laporan ini dapat diperoleh dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap pada menu Cetak – Laporan BMN, dengan rincian sebagai berikut:
Level laporan : SATKER
Jenis Laporan : Laporan Utama
Laporan : Laporan Barang
Sub Laporan : Ekstrakomptabel
Rincian Barang : Sub-sub Kelompok
Periode Sampai Dengan : 2025-14 (pilih periode saat laporan disusun)
Tipe File : PDF

11. Laporan Barang Gabungan

Laporan ini dapat diperoleh dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap pada menu Cetak – Laporan BMN, dengan rincian sebagai berikut:

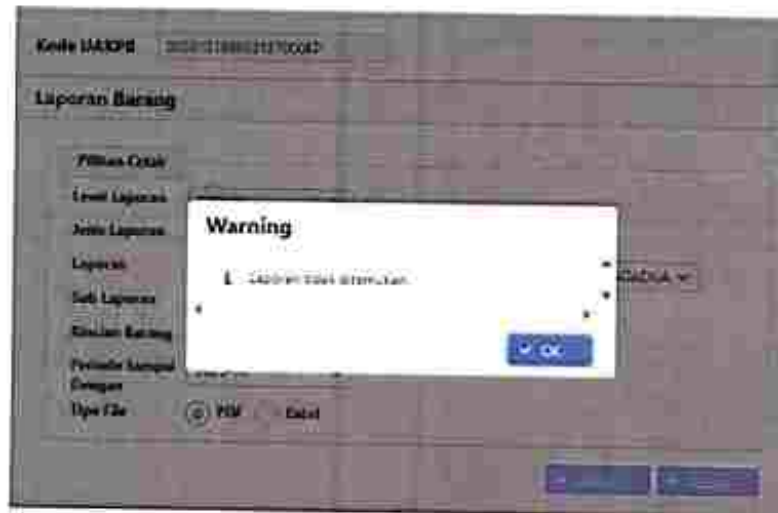
Level laporan : SATKER
Jenis Laporan : Laporan Utama
Laporan : Laporan Barang
Sub Laporan : Gabungan
Rincian Barang : Sub-sub Kelompok
Periode Sampai Dengan : 2025-14 (pilih periode saat laporan disusun)
Tipe File : PDF

12. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Laporan ini dapat diperoleh dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap pada menu Cetak – Laporan BMN, dengan rincian sebagai berikut:

Level laporan : SATKER
Jenis Laporan : Laporan Utama
Laporan : Laporan Barang
Sub Laporan : Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rincian Barang : Sub-sub Kelompok
Periode Sampai Dengan : 2025-14 (pilih periode saat laporan disusun)
Tipe File : PDF

Catatan : Jika terdapat warning "Laporan tidak ditemukan", screenshot tampilan tersebut sebagai lampiran pada Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan.



13. Laporan Aset Tak Berwujud (ATB)

Laporan ini dapat diperoleh dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap pada menu Cetak – Laporan BMN, dengan rincian sebagai berikut:

Level laporan : SATKER
Jenis Laporan : Laporan Utama
Laporan : Laporan Barang
Sub Laporan : Aset Tak Berwujud
Rincian Barang : Sub-sub Kelompok
Periode Sampai Dengan : 2025-14 (pilih periode saat laporan disusun)
Tipe File : PDF

14. Laporan Barang Bersejarah

Laporan ini dapat diperoleh dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap pada menu Cetak – Laporan BMN, dengan rincian sebagai berikut:

Level laporan : SATKER
Jenis Laporan : Laporan Utama
Laporan : Laporan Barang
Sub Laporan : Barang Bersejarah
Rincian Barang : Sub-sub Kelompok
Periode Sampai Dengan : 2025-14 (pilih periode saat laporan disusun)
Tipe File : PDF

15. Laporan Barang Rusak Berat (yang Telah Diusulkan Penghapusannya)

Laporan ini dapat diperoleh dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap pada menu Cetak – Laporan BMN, dengan rincian sebagai berikut:

Level laporan : SATKER
Jenis Laporan : Laporan Tambahan
Laporan : Daftar Barang Rusak Berat Diusulkan ke Pengelola
Periode Sampai Dengan : 2025-14 (pilih periode saat laporan disusun)
Tipe File : PDF

16. Laporan Barang Hilang

Laporan ini dapat diperoleh dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap pada menu Cetak – Laporan BMN, dengan rincian sebagai berikut:

Level laporan : SATKER
Jenis Laporan : Laporan Tambahan
Laporan : Daftar Barang Hilang
Periode Sampai Dengan : 2025-14 (pilih periode saat laporan disusun)
Tipe File : PDF

17. Laporan Barang BPYBDS

Laporan ini dapat diperoleh dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap pada menu Cetak – Laporan BMN, dengan rincian sebagai berikut:

Level laporan : SATKER
Jenis Laporan : Laporan Tambahan
Laporan : Daftar BPYBDS
Periode Sampai Dengan : 2025-14 (pilih periode saat laporan disusun)
Tipe File : PDF

18. Laporan Barang Hibah DK/TP

Laporan ini dapat diperoleh dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap pada menu Cetak – Laporan BMN, dengan rincian sebagai berikut:

Level laporan : SATKER
Jenis Laporan : Laporan Tambahan
Laporan : Daftar Barang Hibah DKTP
Periode Sampai Dengan : 2025-14 (pilih periode saat laporan disusun)
Tipe File : PDF

19. Laporan Penyusutan Intrakomptabel

Laporan ini dapat diperoleh dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap pada menu Cetak – Laporan BMN, dengan rincian sebagai berikut:

Level laporan : SATKER
Jenis Laporan : Laporan Utama
Laporan : Laporan Penyusutan
Sub Laporan : Intrakomptabel
Rincian Barang : Sub-sub Kelompok

Periode Sampai Dengan : 2025-14 (pilih periode saat laporan disusun)
Tipe File : PDF

20. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel

Laporan ini dapat diperoleh dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap pada menu Cetak – Laporan BMN, dengan rincian sebagai berikut:

Level laporan : SATKER
Jenis Laporan : Laporan Utama
Laporan : Laporan Penyusutan
Sub Laporan : Ekstrakomptabel
Rincian Barang : Sub-sub Kelompok
Periode Sampai Dengan : 2025-14 (pilih periode saat laporan disusun)
Tipe File : PDF

21. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB)

Laporan ini dapat diperoleh dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap pada menu Cetak – Laporan BMN, dengan rincian sebagai berikut:

Level laporan : SATKER
Jenis Laporan : Laporan Utama
Laporan : Laporan Penyusutan
Sub Laporan : Aset Tak Berwujud
Rincian Barang : Sub-sub Kelompok
Periode Sampai Dengan : 2025-14 (pilih periode saat laporan disusun)
Tipe File : PDF

22. CaLBMN

Dibuat menyesuaikan dengan Template LBKP

23. Gambaran Umum Pengelolaan BMN

Dibuat menyesuaikan dengan Template LBKP

24. Laporan PNB (yang bersumber dari pengelolaan BMN)

Laporan ini dapat diperoleh dari aplikasi MonSAKTI pada menu Akuntansi dan Pelaporan – Laporan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

Level Laporan : SATKER
Jenis Laporan : Laporan Tambahan
Laporan : Laporan Pendapatan Menurut Akun
Periode Sampai Dengan : 2025-14 (pilih periode saat laporan disusun)
Tipe File : PDF

25. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN

Format Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN dapat diambil pada tautan berikut: <https://bit.ly/FormatLBKPSatker>

26. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara

Format Tabel Excel Bisa Diambil pada tautan berikut:
<https://bit.ly/FormallBKPSatker>

27. Laporan BMN Berupa Rumah Negara

Data terkait rumah negara dapat diperoleh dari Master Aset SIMAN atau e-SADEWA. Data Diambil pada tautan berikut:

<https://bit.ly/LaporanRumahNegara2025Unaudited>

Pilih file excel sesuai wilayah, kemudian diunduh dan dicetak pdf (sampai dengan kolom "8. Keterangan") sesuai data satker yang bersangkutan (sesuai data satker masing-masing).

28. Neraca Percobaan Berbasis AkruaI per 31 Desember 2025

Laporan ini dapat diperoleh dari aplikasi MonSAKTI pada menu Akuntansi dan Pelaporan – Laporan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

Level Laporan : SATKER
Jenis Laporan : Laporan Utama
Laporan : Neraca Percobaan AkruaI
Periode Sampai Dengan : 2025-14 (pilih periode saat laporan disusun)
Tipe File : PDF

29. Neraca Tingkat Kementerian/Lembaga per 31 Desember 2025

Laporan ini dapat diperoleh dari aplikasi MonSAKTI pada menu Akuntansi dan Pelaporan – Laporan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

Level Laporan : SATKER
Jenis Laporan : Laporan Utama
Laporan : Neraca (Face)
Periode Sampai Dengan : 2025-14 (pilih periode saat laporan disusun)
Tipe File : PDF

30. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya

Data terkait Transfer Masuk dan Transfer Keluar dapat diperoleh dari aplikasi MonSAKTI pada menu Akuntansi dan Pelaporan – Monitoring Akuntansi dan Pelaporan Keuangan – Monitoring Transfer Keluar/Masuk. Satuan kerja dapat memberikan penjelasan atas transaksi transfer keluar/masuk yang terjadi pada periode berjalan dan memberikan penjelasan atas selisihnya jika ada.

31. Data/Laporan Aset Sengketa

Format Tabel Excel Bisa Diambil pada tautan berikut: <https://bit.ly/AsetSengketa2025Unaudited>. Unduh dan cetak sesuai data satker yang bersangkutan (sesuai data satker masing-masing). Jika tidak ada aset sengketa, tetap dibuat sesuai format dan diisi NIHIL.

32. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan

Data terkait transaksi hibah masuk dan hibah keluar BMN dapat diperoleh dari Monsakti pada menu Aset Tetap – Monitoring Aset Tetap – Daftar Transaksi BMN dengan memilih transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar.

Format Tabel Excel Bisa Diambil pada tautan berikut: <https://bit.ly/FormatLBKPSatker>

LAMPIRAN

1. Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode Persediaan
2. Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode BMN
3. Penjelasan BMN: Persediaan yang Belum Diregister
4. Penjelasan BMN: Jalan dan Jembatan
5. Penjelasan BMN: Irigasi
6. Penjelasan BMN: Jaringan
7. Penjelasan BMN: Aset Tetap Renovasi
8. Penjelasan BMN: Aset Tetap yang Belum Diregister
9. Penjelasan BMN: Aset Tak Berwujud Lainnya
10. Penjelasan BMN: Hibah Langsung yang Belum Disahkan
11. Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Persediaan

12. Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
13. Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi
14. Penjelasan BMN: Koreksi atas Reklas Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya
15. Penjelasan BMN: Pendapatan Perolehan Aset Lainnya
16. Penjelasan BMN: Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan
17. Penjelasan BMN: Beban Penyesuaian Nilai Persediaan
18. Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin
19. Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan
20. Penjelasan BMN: Beban Pelepasan Aset
21. Penjelasan BMN: Beban Persediaan Rusak/Usang

Lampiran Penjelasan BMN dapat diperoleh dari E-Sadewa pada menu Penatausahaan – Telaah Data. Satuan kerja dapat melakukan Export Data dengan memilih Jenis To Do List dan periode (13) sesuai dengan telaah data yang ada pada satuan kerja.

LBKP (*full form*) ini dijadikan menjadi satu sebagai kewajiban satuan kerja untuk menyusun Laporan Barang Milik Negara dan disampaikan kepada KPKNL setempat secara tepat waktu.

B. Penyampaian LBKP Melalui Aplikasi e-SADEWA

Penyampaian LBKP satker di Mahkamah Agung disampaikan melalui aplikasi e-SADEWA pada menu **Penatausahaan BMN - LBKP** dalam bentuk *Portable Document Format (PDF)*. Proses penyampaian LBKP tidak dilakukan secara utuh (*full form*) untuk memudahkan dan menyesuaikan dengan penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang dibagi menjadi 5 bagian ditambah dengan Surat Pengantar (total ada 6).

Berikut ini adalah rincian tiap-tiap bagiannya:

1. **Surat Pengantar:** merupakan Surat Satuan Kerja yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung c.q. Kepala Biro Perlengkapan (untuk LBP-E1) atau Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung c.q. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (untuk LBKP dan LBP-W) yang pada intinya berisi penyampaian LBMN satuan kerja (*Lampiran II*).
2. **Overview:** merupakan bagian dari LBKP (*full form*) mulai dari angka 1 sampai dengan angka 4, yaitu Cover, Kata Pengantar, Daftar Isi, dan *Overview*.
3. **BAR Internal:** merupakan bagian dari LBKP (*full form*) mulai dari angka 5 sampai dengan 21, yaitu Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAPB dan UAPA, Laporan Posisi BMN Di Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) – 01 Januari 2025, Laporan Barang Persediaan, Laporan Barang Intrakomptabel, Laporan Barang Ekstrakomptabel, Laporan Barang Gabungan, Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan, Laporan Aset Tak Berwujud (ATB), Laporan Barang Bersejarah, Laporan Barang Rusak Berat yang Telah Diusulkan Penghapusannya, Laporan Barang Hilang, Laporan Barang BPYBDS, Laporan Barang Hibah DK/TP, Laporan Penyusutan Intrakomptabel, Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel, dan Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB).

4. **CaLBMN**, merupakan bagian dari LBKP (*full form*) pada angka 22 dan 23 , yaitu CaLBMN dan Gambaran Umum Pengelolaan BMN ditambah/digabungkan (*merged*) dengan bagian Lampiran (Penjelasan-penjelasan) jika memang ada.
5. **Cetakan MonSAKTI**, merupakan bagian dari LBKP (*full form*) pada angka 24 sampai dengan angka 32, yaitu Laporan PNBPN (yang bersumber dari pengelolaan BMN), Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN, Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara, Laporan BMN Berupa Rumah Negara, Neraca Percobaan Berbasis Akrual per 31 Desember 2025, Neraca Tingkat Kementerian/Lembaga per 31 Desember 2025, Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya, Data/Laporan Aset Sengketa, Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan.
6. **BA Opname Fisik (*Audited*)**, merupakan cetakan opname fisik persediaan per 31 Desember 2025 yang meliputi BA Opname Fisik DIPA Teknis dan BA Opname Fisik DIPA Non Teknis.



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup aset-aset yang dimiliki negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pertanggungjawaban atas keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan BMN merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan secara terintegrasi dan transparan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN serta pengelolaan BMN, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai salah satu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di bawah Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), yaitu Badan Urusan Administrasi untuk DIPA 01 melalui Biro Perlengkapan. LBKP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025 (*AUDITED*) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik Negara untuk periode tahunan.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025 (*AUDITED*) ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK



Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan komitmennya menyajikan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung penyusunan laporan ini.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LBKP Tahunan Pengadilan ... Tahun 2025 (*AUDITED*), kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran menyeluruh terkait pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan di jajaran manajemen Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait dengan pengelolaan BMN.

Jakarta, 04 April 2026

Sekretaris Sekretaris Pengadilan Tata
Usaha Negara Pangkalpinang Sekretaris
selaku Kuasa Pengguna Barang



Dora Natalia Singarimbun, SE, M.M
NIP. 19811229 200604 2 015



DAFTAR ISI

DATA UTAMA

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
4. Laporan Barang Persediaan
5. Laporan Barang Intrakomptabel
6. Laporan Barang Ekstrakomptabel
7. Laporan Barang Gabungan
8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. Laporan Aset Tak Berwujud
10. Laporan Barang Bersejarah
11. Laporan Barang Rusak Berat
12. Laporan Barang Hilang
13. Laporan Barang BPYBDS
14. Laporan Barang Hibah DK/TP
15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel
16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel
17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud
18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)
19. Laporan PNPB (yang bersumber dari Pengelolaan BMN)
20. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara
21. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
22. Laporan BMN Berupa Rumah Negara

DATA TAMBAHAN

1. Neraca Percobaan Berbasis AkruaL dan Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja (2 Dokumen Cetak)
2. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya
3. Data/Laporan Aset Sengketa (Jika Tidak Ada Dibuat NIHIL)
4. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan
5. Gambaran Umum Terkait Pengelolaan BMN



DAFTAR LAMPIRAN

1. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode Persediaan (jika ada)**
2. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode BMN (jika ada)**
3. **Penjelasan BMN: Jalan dan Jembatan (jika ada)**
4. **Penjelasan BMN: Irigasi (jika ada)**
5. **Penjelasan BMN: Jaringan (jika ada)**
6. **Penjelasan BMN: Aset Tetap Renovasi (jika ada)**
7. **Penjelasan BMN: Aset Tak Berwujud Lainnya (jika ada)**
8. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Persediaan (jika ada)**
9. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (jika ada)**
10. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi (jika ada)**
11. **Penjelasan BMN: Koreksi atas Reklas Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (jika ada)**
12. **Penjelasan BMN: Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
13. **Penjelasan BMN: Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
14. **Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin (jika ada)**
15. **Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan (jika ada)**
16. **Penjelasan BMN: Beban Pelepasan Aset (jika ada)**
17. **Penjelasan BMN: Beban Persediaan Rusak/Usang (jika ada)**



OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025 (AUDITED)

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 *AUDITED* merupakan laporan tahunan yang disusun oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode Tahun Anggaran 2025 serta mutasi selama periode tersebut. LBP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selama Tahun Anggaran 2025.

Tujuan utama penyusunan LBKP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (*AUDITED*) ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhir BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang beserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBP *AUDITED* ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (*AUDITED*).

Penyusunan LBKP (*AUDITED*) ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBP (*AUDITED*) ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2025, dan Nomor S-3/KN/KN.2/2025 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Dalam penyusunannya, LBP (*AUDITED*) ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MonSAKTI (Monitoring SAKTI) milik Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integritas data yang disajikan dalam laporan.

Laporan ini memuat berbagai informasi penting terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN, yang terdiri dari:



1. LBMN Berdasarkan Perkiraan Neraca: Bagian ini menyajikan informasi aset BMN secara rinci, meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Lainnya (termasuk Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah). Selain itu, laporan ini juga merinci Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (khususnya untuk aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah);
2. Nilai Neraca per 31 Desember 2025 adalah Rp 26.445.861.828,00 yang berasal dari nilai saldo awal 1 Januari 2025 sebesar Rp 27.697.209.048,00 dan mutasi tambah kurang sebesar Rp 572.203.496,00.
3. Saldo persediaan per 31 Desember 2025 adalah Rp19.645.840,00 yang berasal dari nilai saldo awal persediaan per 1 Januari 2025 sebesar Rp 2.602.450,00 dan mutasi tambah kurang sebesar Rp 17.043.390,00;
4. Mutasi tambah aset terjadi karena: (1) realisasi belanja modal, terdiri atas pembelian; (2) Transfer Masuk BMN; (3) Koreksi Nilai Bertambah dan lain sebagainya. Total mutasi tambah aset adalah sebesar Rp 25.542.083.089,00;
5. Mutasi kurang aset terjadi karena: (1) pemindahtanganan BMN (jika ada penghapusan melalui penjualan); (2) hibah keluar BMN; (3) transfer keluar; (4) pemusnahan BMN; (5) Koreksi Nilai Berkurang (6) penghapusan BMN dan lain sebagainya. Total mutasi kurang aset adalah sebesar Rp 24.969.879.593,00;
6. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara: bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna barang mengenai hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Pengguna. Catatan ini mencakup uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Barang Pengguna, serta daftar rinci atau uraian mengenai mutasi aset yang disajikan dalam Neraca dan Informasi penting lainnya; dan
7. Gambaran Umum Pengelolaan BMN: bagian ini memuat data Penetapan Status Penggunaan BMN (sudah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaan); pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan): 1) dalam proses permohonan ke Pengelola; 2) dalam proses Pengelola Barang; 3) selesai di Pengelola Barang baik dikembalikan, ditolak dan disetujui; 4) dalam proses tindak lanjut Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang; 5) telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola Barang; 6) tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang; dan 7) selesai serah terima.

LBKP (AUDITED) ini merupakan landasan penting dalam penyusunan Laporan



Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Tahun 2025 (*AUDITED*). Penyusunan LBKP (*AUDITED*) yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP (*AUDITED*) ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyusun LBKP (*AUDITED*) secara tepat waktu dan akurat, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah berkomitmen dalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.



18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)

LAPORAN KUNCIAN DAN CATATAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025 (AUDITED)



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.



A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodeifikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian



Barang Milik Negara;

- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengusuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;



- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodeifikasi Barang Milik Negara;
- 33) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 34) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodeifikasi Segmen Akun pada Bagian Akun Standar; dan
- 35) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CaLBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif



dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN

A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan



Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2025, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan matrik terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.

B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh



masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih,
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih,
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.



Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dalam LBKP Tahun 2025 (AUDITED) ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

- 11 | PENJELASAN BMN YANG HANDAL | AKUNTABEL | TRANSPARAN | PROFESIONAL

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor -. Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tingkat K/L Tahun 2025 dan Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-3/KN/KN.2/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada K/L Tahun 2025 (*AUDITED*).

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara



Pangkalpinang periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (AUDITED) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (AUDITED) ini adalah sebesar Rp 34,315,013,142,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Belas Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp33,742,809,646,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2025 sebesar Rp. 572,203,496,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam rupiah*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp 25,542,083,089,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp 24,969,579,593,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.



Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2025
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN);
16. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2025 menurut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebesar Rp 33,742,809,646,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp34,290,599,892,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 24,413,250,00 (*Dua puluh Empat Juta Empat ratus Tiga belas Ribu Dua ratus Lima puluh rupiah*).

B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (AUDITED)



Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Tahun 2025 (*AUDITED*) yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:
(Selanjutnya diisi sesuai PMK No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada Lampiran VI (halaman 190-217))

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (*AUDITED*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.320.240,00 (*sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	2.174.800	13.921.440	16.096.240
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	427.650	2.796.350	3.224.000
	Jumlah	2.602.450	16.717.790	19.320.240

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp 0,00 yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp 0,00 dan kondisi usang senilai Rp 0,00 .



2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (*AUDITED*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 4.000 m² dengan nilai sebesar Rp 25.308.000,- (Dua Puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah). Mutasi tambah dengan nilai sebesar 25.308.000,- (Dua Puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah), dan mutasi kurang dengan nilai sebesar 25.308.000,- (Dua Puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Masuk	25.308.000,-

Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah Tanah

Mutasi Kurang Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar	25.308.000,-

Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang Tanah

(data dapat diambil dari cetakan Laporan CRBMN)

Dari jumlah/ nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah ... bidang dengan nilai sebesar Rp (...dalam huruf ...), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan 0 bidang dengan nilai sebesar Rp.0

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	4000	25.308.000,-
Rusak Ringan	-	-



Rusak Berat	-	-
-------------	---	---

Tabel 4. Kondisi Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah (Jika Ada)

Realisasi belanja modal tanah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00 (data dapat diambil di aplikasi MonSAKTI: Monitoring Aset Tetap - Monitoring Belanja Modal vs Aset), filter sesuai jenis belanja)

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebanyak 490 buah dengan nilai sebesar Rp 7.689.205.153,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 490 buah dengan nilai sebesar Rp 7.117.001.657,00 (*Tujuh Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Seribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 34 buah dengan nilai sebesar Rp 628.646.996,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 56.443.500,00 (*Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebanyak 4 buah dengan nilai sebesar Rp 614.774.765,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 4 buah dengan nilai sebesar Rp 614.774.765,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.



Mutasi Tambah Alat besar tersebut meliputi:

Uraian jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	571.553.496,-	650.000,-
Reklasifikasi Masuk	56.443.500,-	-

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Besar

Mutasi Kurang Alat besar tersebut meliputi:

Uraian jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi keluar	56.443.500,-	-

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Besar

(data dapat diambil dari cetakan Laporan CRBMN)

Dari jumlah Alat besar di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.

(data dapat diambil dari cetakan Laporan CRBMN)

Rincian data Alat Besar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	4	614.774.765,-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 7. Kondisi Alat Besar

b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebanyak 4 buah dengan nilai sebesar Rp 726.585.363,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 4 buah dengan nilai sebesar Rp 383.985.363,00, mutasi tambah sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 342.600.000,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00. (tidak perlu lagi dalam huruf untuk bagian ini)

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:



Uraian jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	342.600.000,-	-
Reklasifikasi Masuk	-	-

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat angkutan

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi keluar	-	-

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat angkutan

(data dapat diambil dari cetakan Laporan CRBMN)

Dari jumlah Alat angkutan di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

-

d. Alat Pertanian (3.04)

-

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebanyak 406 buah dengan nilai sebesar Rp 5.047.390.319,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 392 buah dengan nilai sebesar Rp 4.929.296.821,00, mutasi tambah sebanyak 16 buah dengan nilai sebesar Rp 174.536.998,00 dan mutasi kurang sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 56.443.500,00. (tidak perlu lagi dalam huruf untuk bagian ini)

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	117.443.498,-	650.000,-
Reklasifikasi Masuk	56.443.500,-	-

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi keluar	56.443.500,-	-

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.

f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp 178.789.094,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 12 buah dengan nilai sebesar Rp 178.789.094,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00. (tidak perlu lagi dalam huruf untuk bagian ini)

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, Saldo Alat Besar yang



statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.

g. Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebanyak 9 buah dengan nilai sebesar Rp 19.771.640,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 9 buah dengan nilai sebesar Rp 19.771.640,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00. (tidak perlu lagi dalam huruf untuk bagian ini)

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.

h. Alat Laboratorium (3.08)

-

i. Alat Persenjataan (3.09)

-

j. Komputer (3.10)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebanyak 406 buah dengan nilai sebesar Rp 5.047.390.319,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 392 buah dengan nilai sebesar Rp 4.929.296.821,00, mutasi tambah sebanyak 16 buah dengan nilai sebesar Rp 174.536.998,00 dan mutasi kurang sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 56.443.500,00. (tidak perlu lagi dalam huruf untuk bagian ini)

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ektrakomptabel (Rp)
Pembelian	117.443.498,-	650.000,-
Reklasifikasi Masuk	56.443.500,-	-

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:



Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi keluar	56.443.500,-	-

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp.0,00.

- k. Alat Eksplorasi (3.11)
-
- l. Alat Pengeboran (3.12)
-
- m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)japa
-
- n. Alat Bantu Eksplorasi (3.14)
-
- o. Alat Keselamatan Kerja (3.15)
-
- p. Alat Peraga (3.16)
-
- q. Peralatan Proses/Produksi (3.17)
-
- r. Rambu-Rambu (3.18)
-
- s. Peralatan Olahraga (3.19)
-



Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 7.886.520.539,000,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin intrakomptabel sebesar Rp 7.864.058.304,00 dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel sebesar Rp 22.462.235,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Jika Ada)

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00.

(data dapat diambil di aplikasi MonSAKTI: Monitoring Aset Tetap – Monitoring Belanja Modal vs Aset). filter sesuai jenis belanja)

1. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp 26.580.019.989,00 (Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp 26.580.019.989,00 (Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), mutasi tambah sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 24.888.128.093,00 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Tiga rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 24.888.128.093,00 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Tiga rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung (401)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 25.256.592.619,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 25.256.592.619,00.



mutasi tambah sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 24.888.128.093,00 dan mutasi kurang sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 24.888.128.093,0.

Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi masuk	24.888.128.093	-

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi keluar	24.888.128.093	-

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Kelompok barang Bangunan Gedung yang statusnya dibentakan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	2160	25.256.592.619
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 10. Kondisi Bangunan Gedung

- b. Monumen (402)
-
- c. Bangunan Menara (403)
-



d. Tugu Titik Kontrol/Pasti (404)

Saldo Tugu Titik Kontrol/ Pasti pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 1.323.427.370,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp 1.323.427.370,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Mutasi Tambah Tugu Titik Kontrol/ Pasti tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung

Mutasi Kurang Tugu Titik Kontrol/ Pasti tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/ Pasti di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Kelompok barang Tugu Titik Kontrol/ Pasti yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp. 0,00.

Rincian data Tugu Titik Kontrol/ Pasti berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	800	1.323.427.370
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 10. Kondisi Tugu Titik Kontrol/ Pasti



Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.109.878.089,00 (Dua Miliar Seratus Sembilan Juta Delapanratus Tujuh puluh Delapan Ribu Delapanpuluh Sembilan rupiah). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan intrakomptabel sebesar Rp2.109.878.089,00 dan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

Monitoring Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan (jika ada)

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

2. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00 . Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah Jalan dan Jembatan, 0 buah Irigasi, serta 0 buah Jaringan dengan nilai sebesar Rp 0,00 . Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah (Jalan dan Jembatan/Irigasi/Jaringan) dengan nilai sebesar Rp 0, dan mutasi kurang sebanyak 0 buah (Jalan dan Jembatan/Irigasi/Jaringan) dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan adalah sebagai berikut:
Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan



Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00. Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan jalan, jembatan, irigasi serta jaringan intrakomptabel sebesar Rp 0,00 dan akumulasi penyusutan jalan, jembatan, irigasi serta jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp 0,00.

Monitoring Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan (Jika Ada)

Realisasi belanja modal jalan dan jembatan, irigasi serta jaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00.

3. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 190.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 190.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00, dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0,00.

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 190.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 190.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-



Tabel 13. Rincian Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 14. Rincian Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah Nihil.

- b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Diah Raga (6.02)
-
- c. Tanaman (6.05)
-
- d. Aset Tetap dalam Renovasi (6.07)

Saldo Aset Tetap dalam Renovasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp 20.290.000,00 (*Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 3 buah dengan nilai Rp 20.290.000,00 (*Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Aset Tetap dalam Renovasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 15. Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap dalam Renovasi

Mutasi Kurang Aset Tetap dalam Renovasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 16. Rincian Mutasi Kurang Aset Tetap dalam Renovasi



Dari jumlah aset tetap dalam renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0. Kelompok barang aset tetap dalam renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan jalan, jembatan, irigasi serta jaringan intrakomptabel sebesar Rp 0,00 dan akumulasi penyusutan jalan, jembatan, irigasi serta jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp 0,00.

Monitoring Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00

4. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00.

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:



Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

5. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (*AUDITED*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00. Rincian Mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak memiliki BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

b. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (*AUDITED*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per kelompok barang adalah sebagai berikut:

1) Software

Saldo Software pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (*AUDITED*) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Software yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NILAI.

2) Lisensi



3) Hak Kajian/ Penelitian

4) Aset Tak Berwujud Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

c. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp 20.290.000,00 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp20.290.000,00 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00.

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Alat Kantor	6.100.000	-
2. Komputer Unit	4.200.000	-
3. Alat Rumah Tangga	9.990.000	-
Jumlah	20.290.000	-

Tabel 23. BMN yang Telah Dihentikan Penggunaannya per 31. Desember 2025



Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.290.000,00 (Duapuluh juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sehingga didapat Nilai Netto dari Akun Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 yang sebelumnya senilai Rp20.290.000,00 (Duapuluh juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp20.290.000,00 (Duapuluh juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

d. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tak Berwujud (ATB) yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00. Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00, nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp 0,00, dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp 0,00.

Akumulasi Penyusutan ATB Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 sehingga didapat Nilai Netto dari Akun ATB yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025 yang sebelumnya Rp 0,00 menjadi Rp 0,00.

6. Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 0 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit, atau Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak memiliki BMN berupa Aset Bersejarah.



V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2025

A. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 26,445,861,828 (Dua puluh Enam Miliar Empat ratus Empat puluh Lima juta Delapan ratus Enam puluh Satu Ribu Delapan ratus Dua puluh Delapan Rupiah) nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya. Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Klasifikasi Neraca	Perkiraan Neraca		Saldo Awal		Saldo Akhir	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	19.326.240	0,06	-	-	19.326.240	0,06
	Sub-jumlah (1)	19.326.240	0,06	-	-	19.326.240	0,06
II	Aset Tetap						
1	Tanah	25.308.000	0,07	-	-	25.308.000	0,07
2	Peralatan dan Mesin	7.664.791.503	22,34	24.413.250	100,00	7.689.205.153	22,40
3	Gedung dan Bangunan	26.500.819.989	77,47	-	-	26.500.819.989	77,42
4	Jalan dan jembatan, irigasi serta jaringan	-	-	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	290.000	0,00	-	-	290.000	0,00
6	KDP	-	-	-	-	-	-
	Sub-jumlah (2)	24.279.309.892	99,99	24.413.250	100,00	24.294.723.142	99,99
III	Aset Lainnya						
1	Konstruksi dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-
3	Aset yang Diwariskan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	28.290.000	0,08	-	-	28.290.000	0,08
	Sub-jumlah (3)	28.290.000	0,08	-	-	28.290.000	0,08
	Total	54.594.260.132	100	24.413.250	100	54.394.233.382	100

Tabel 26. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca



Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kusa Pengguna
Pengadilan Tata Usaha Negara Fangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31
Desember 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Uttrakumulatif		Kustrakumulatif		Salangan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I Aset Lancar							
1 Persediaan		-	-	-	-	-	-
Sub jumlah (1)		-	-	-	-	-	-
II Aset Tetap							
1 Tanah		-	-	-	-	-	-
2 Peralatan dan Mesin		(5.733.890.215)	72,91	(22.462.235)	100,00	(5.756.353.450)	72,99
3 Gedung dan Bangunan		(2.109.870.889)	26,83	-	-	(2.109.870.889)	26,75
4 Jalan dan jembatan, irigasi serta jaringan		-	-	-	-	-	-
5 Aset Tetap Lainnya		-	0	-	-	-	-
6 KDP		-	-	-	-	-	-
Sub jumlah (2)		(7.843.761.104)	99,74	(22.462.235)	100,00	(7.866.230.539)	99,74
III Aset Lainnya							
1 Kontribusi dengan Pihak Ketiga		-	-	-	-	-	-
2 Aset Tak Berwujud		-	-	-	-	-	-
3 Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah		(20.290.000)	0,26	-	-	(20.290.000)	0,26
Sub jumlah (3)		(20.290.000)	0,26	-	-	(20.290.000)	0,26
Total		(7.864.051.104)	100	(22.462.235)	100	(7.886.511.344)	100

Tabel 26. Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Per Akun Neraca

B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No.	Urutan Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
I	Aset Lancar			-
1.	Persediaan	19.320.240	19.320.240	-
II	Aset Tetap			
1.	Tanah	25.308.000	25.308.000	-
2.	Peralatan dan Mesin	7.664.791.903	7.664.791.903	-
3.	Gedung dan Bangunan	26.580.019.909	26.580.019.909	-
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	190.000	190.000	-
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	7.843.768.304	7.843.768.304	-
III	Aset Lainnya			
1.	Aset Tak Berwujud	-	-	-
2.	Aset Lain-Lain *)	-	-	-
3.	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	20.290.000	20.290.000	-
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	20.290.000	20.290.000	-
Total Nilai BMN (Jumlahingtabut/Setara)		14.445.051.020	14.445.051.020	-

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 27. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.



VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir (AUDITED), dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan Unaudited 2021	23.872.519.405	-	-
2	Laporan Unaudited 2022	31.185.363.842	7.312.844.437,00	31%
3	Laporan Unaudited 2023	29.472.191.781	- 1.713.172.061,00	-5%
4	Laporan Unaudited 2024	27.697.209.048	- 1.774.982.733,00	-6%
5	Laporan Unaudited 2025	26.445.861.828	- 1.251.347.220,00	-5%

Tabel 27. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Periode Laporan AUDITED

B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah	-	0	1	25.308.000
2	Alat Angkutan Bermotor	2	342.600.000	4	383.985.363
3	Peralatan & Mesin NON TIK	13	243.985.338	414	4.982.765.715
4	Peralatan & Mesin Khusus TIK	9	31.499.998	70	1.000.373.974
5	Alat Berat	-	0	4	614.774.765
6	Alat Senjata	-	0	-	0
7	Bangunan Gedung	-	0	3	26.580.019.999
8	Rumah Negara	-	0	-	0
9	Jalan & Jembatan	-	0	-	0
10	Bangunan Air & Irigasi	-	0	-	0
11	Instalasi & Jaringan	-	0	-	0
12	Aset Tetap Lainnya	-	0	2	190.000
13	Aset Tak Berwujud	-	0	-	0
JUMLAH		24	618.885.336	498	32.587.417.806

Tabel 28. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025



b. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selama periode Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

No	Urutan	Pengguna	Pemilik	Pemeliharaan	Pemrosesan	Penghapusan	Aktif	Idle	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	dikembalikan	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	Ditolak	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	Ditertajui	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tidak lanjut: Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Telaah diteruskan	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Keputusan oleh Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tidak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Selesai serah terima dari Pengguna Barang	2	0	0	0	0	0	0	2
10	Gagal/Batal proses dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 29 Pengelolaan BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025

c. Pengelolaan BMN Idle

No	Urutan	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telaah diteruskan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Tabel 30. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025



d. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

1. Daftar Barang Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kusa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 (AUDITED) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20,290,000,00 sebagaimana rincian pada Daftar BMN Rusak Berat yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

e. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

1. BMN dalam sengketa/perkara/bermasalah

2. Tanah Belum Bersertipikat

f. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

g. Pengungkapan Penting Lainnya

h. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Perubahan Kodefikasi BMN, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melaksanakan perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang (Awal)	NUP	Nama Barang (Akhir)	NUP
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Bangunan Gedung Kantor PTUN Tipe C	1

Tabel 33. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

I. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya



C. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKKL Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, **Tidak Terdapat** temuan BPK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terkait ... (Aset Tetap/Persediaan/dll) dengan rincian temuan dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Temuan BPK atas LKKL

No	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	-	-

Tabel 34. Daftar Temuan BPK atas LKKL 2024 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

2. Temuan BPK atas LKPP

No	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	-	-

Tabel 34. Daftar Temuan BPK atas LKPP 2024 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selama tahun 2025.

a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah mengajukan RKBMN untuk Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RKBMN	Nama Barang	Hasil Telah
1	Pemeliharaan	Peralatan dan Mesin	Disetujui
2	Pengadaan	Station Wagon	Tidak Disetujui
3	Pengadaan	Sepeda Motor	Tidak Disetujui
4	Pengasuransian	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe C	Disetujui



Dari tabel di atas terdapat total usulan RKBMN yang berdasarkan hasil telaah disetujui sebanyak 2 usulan dan tidak disetujui sebanyak 2 usulan

Pada Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang juga telah mengajukan usulan RP3BMN untuk Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:

- "Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak mengajukan usulan RP3BMN untuk tahun 2027."

Revisi RKBMN

- "Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak mengajukan Revisi RKBMN untuk tahun 2027."

b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 498 unit dengan nilai sebesar Rp33.587.417.806,00. Namun, masih terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya sebanyak 24 unit dengan nilai sebesar Rp618.085.336,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BMN	Status Penggunaan Status Penggunaan		Status Penggunaan Status Penggunaan		Jumlah BMN	
	Kuantitas (A)	Nilai (Rp) (C)	Kuantitas (B)	Nilai (Rp) (D)	Kuantitas (A+B)	Nilai (C+D)
Tanah	-	-	1	25.308.000	1	25.308.000
Alat Angkutan Bermotor	2	342.600.000	4	383.985.363	6	726.585.363
Peralatan & Mesin NON TIK	13	243.983.338	424	4.982.765.715	437	5.226.751.053
Peralatan & Mesin Khusus TIK	9	31.499.990	70	1.000.373.974	79	1.031.873.974
Alat Berat	-	-	4	614.774.765	4	614.774.765
Alat Senjata	-	-	-	-	-	-
Bangunan Gedung	-	-	3	26.580.019.989	3	26.580.019.989
Rumah Negara	-	-	-	-	-	-
Jalan & Jembatan	-	-	-	-	-	-
Bangunan Air & Irigasi	-	-	-	-	-	-
Instalasi & Jaringan	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	2	100.000	2	100.000
Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-
	24	618.085.336	498	33.587.417.806	522	34.205.503.142



c. Pengelolaan BMN

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melakukan permohonan terkait (Penjualan dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) ke Pengelola Barang (melalui KPKNI, setempat) sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 31 Desember 2025 masih terdapat permohonan terkait pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang untuk menerbitkan persetujuan/keputusan (Penjualan dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) dengan nilai sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

"Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses permohonan ke pengelola"

2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 31 Desember 2025 masih terdapat permohonan terkait pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk permohonan pengelolaan BMN dengan rincian sebagai berikut:

"Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang."

3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menerima Keputusan dari Pengelola Barang dengan nilai sebesar Rpxx, dengan rincian sebagai berikut

No	No. Tiket	No. Keputusan	Jenis Barang	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL25042809074224 186	136/KPTUN.WS- TUNS/PL1.2.3/I V/2025	Peralatan & mesin	60.000

4. Selesai Serah Terima

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menerima Keputusan dari Pengguna Barang dengan nilai sebesar Rpxx, dengan rincian sebagai berikut:



No.	No. Tiket	Jenis Permohonan (PSP, Penjualan, dll)	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL25031812113648107	PSP	7.950.000
2	PPL25042809074224186	Penjualan	60.000



DATA UTAMA

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025 (AUDITED)



BERKAS



BERKAS



BERKAS



1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA

LAPORAN KUASA I & TETAPAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025 (AUDITED)



BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
SATUAN KERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG (401988)
SEMESTER II TAHUN 2025
NOMOR : 041/SEK.PTUN.WS-TUN&PL.1.2.5/2025

Pada Hari ini Senin Tanggal dua puluh tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (23/02/2026), bertempat di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Komplek Perkantoran Pemprop Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : Orit Samuel Purba, S.T.
#REF : 19911128 202506 1 004
Jabatan : Petugas UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Nama : Fanny Ruspanji, S.E.I.
NIP : 19900412 202012 1 009
Jabatan : Petugas UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada tingkat internal Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (BPK) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode 31 Desember Tahun Anggaran 2025, dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Aksi Neraca	Nilai BMN Periode Semester I Tahun Anggaran 2025		
		Saldo Awal per 01 Januari 2025	MBNU	Saldo Akhir per 31 Desember 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
A. ASET LANCAR				
1. Peredaran		2.842.430	17.843.399	18.845.849
B. ASET TETAP		2.602.450	17.343.790	19.946.240
1. Tanah		27.894.888.888	(1.283.866.810)	26.611.022.078
2. Perakitan dan Mesin		25.300.000	0	25.300.000
3. Gedung dan Bangunan		7.005.798.407	871.852.498	7.877.650.905
4. Aset Tetap Lainnya		25.580.079.889	0	25.580.079.889
5. Kumulasi Depresiasi Perakitan dan Mesin		190.000	0	190.000
6. Akumulasi Penyusutan Perakitan dan Mesin		0	0	0
7. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(4.429.844.814)	(1.547.844.801)	(5.977.689.615)
8. Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		(1.578.266.184)	(551.871.308)	(2.130.137.492)
9. Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		28.299.808	0	28.299.808
C. ASET LAINNYA		28.299.808	0	28.299.808
1. Aset Tak Berwujud		0	0	0
2. Aset Lainnya		0	0	0
D. SUB JUMLAH (A+B+C)		27.697.209.948	(4.281.821.921)	23.415.388.027
E. EKSTRAKOMPTABEL		23.781.356	498.880	24.279.236
F. TOTAL (D+E)		27.720.991.304	(4.281.323.041)	23.439.668.263

2. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBRPK dan UOOL, diungkap dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Dengan Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LUPP periode 31 Desember Tahun Anggaran 2025, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator ASBT

Orit Samuel Purba, S.T.
NIP. 199111282025061004

Operator GUP

Fanny Ruspanji, S.E.I.
NIP. 199004122020121009

Mengesahkan
Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Ditandatangani dan Stempel
NIP. 198112252005042013

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN

[Signature] *[Signature]*

Revisi: *[Signature]* *[Signature]*

II. PERIODE

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

UNIT ORGANISASI

1. Kode: 0 0 5 - 0 1 1 2 0 0 0 - 4 0 1 9 0 8 0 0 0 - K 0

2. Nama: Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Jl. Pulau Bangka, Komplek Pempro Bangka Belitung.

III. SALDO AKHIR PERIODE

NO	PERUBAHAN NERACA	OLP	ASET TETAP	KESEPAKATAN
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
A	ASET LANCAR			
1	Persewaan	19.645.840	19.645.840	19.645.840
B	ASET TETAP			
1	Tanah	28.425.541.588	28.425.541.588	28.425.541.588
2	Peralatan dan Meubel	25.308.000	25.308.000	25.308.000
3	Gedung dan Bangunan	7.664.791.900	7.664.791.900	7.664.791.900
4	Aset tetap lainnya	26.580.019.889	26.580.019.889	26.580.019.889
5	Konstruksi dalam pengerjaan	100.000	100.000	100.000
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Meubel	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-5.733.890.215	-5.733.890.215	-5.733.890.215
8	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-2.109.878.089	-2.109.878.089	-2.109.878.089
9	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	20.200.000	20.200.000	20.200.000
C	ASET LAINNYA			
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	25.446.187.428	25.446.187.428	25.446.187.428
E	EKSTRAKOMPTABEL	24.413.250	24.413.250	24.413.250
F	TOTAL (D+E)	25.470.600.678	25.470.600.678	25.470.600.678

IV. DATA KOREKSI AUDIT SALDO NILAI BMN

NO	PERUBAHAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
(A)	(B)	(C)	TAMBAH	KURANG	(D) = (C) + (E) - (F)
A	ASET LANCAR				
1	Persewaan	19.645.840	0	0	19.645.840
B	ASET TETAP				
1	Tanah	28.425.541.588	0	0	28.425.541.588
2	Peralatan dan Meubel	25.308.000	0	0	25.308.000
3	Gedung dan Bangunan	7.664.791.900	0	0	7.664.791.900
4	Aset tetap lainnya	26.580.019.889	0	0	26.580.019.889
5	Konstruksi dalam pengerjaan	100.000	0	0	100.000
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Meubel	0	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-5.733.890.215	0	0	-5.733.890.215
8	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-2.109.878.089	0	0	-2.109.878.089
9	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	20.200.000	0	0	20.200.000
C	ASET LAINNYA				
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	25.446.187.428	0	0	25.446.187.428
E	EKSTRAKOMPTABEL	24.413.250	0	0	24.413.250
F	TOTAL (D+E)	25.470.600.678	0	0	25.470.600.678

B. PERIOD			
1	2	3	4

V. REALISASI BELANJA PEMBENTUK DAM						
NO	PERKIRAAN KERACA	BELANJA KOGAL	BELANJA NON MOBAL			TOTAL
			Belanja Gasing	Belanja Denda Sosial	Belanja Lainnya	
A	ASET LANCAR	10	10	0	0	10
1	Persediaan	0	0	0	0	0
B	ASET TETAP	0	0	0	0	0
1	Tanah	0	0	0	0	0
2	Pertemuan dan Meubel	0	0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0
4	Rakit Kapal Lainnya	0	0	0	0	0
5	Peralatan perlengkapan persediaan dan meubel	0	0	0	0	0
6	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	0	0	0	0	0
7	Akumulasi penyusutan peralatan perlengkapan dan meubel	0	0	0	0	0
8	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0	0
C	ASET LAMBUYA	0	0	0	0	0
1	Aset Tetap Berwujud	0	0	0	0	0
2	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0	0
D	SUM JARAN (A+B+C)	0	0	0	0	0
E	EBERKADAMPTABLE	0	0	0	0	0
F	TOTAL (D+E)	0	0	0	0	0

Jumlah Pemotongan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BUMN pada periode Bulan Desember Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 0.

Tidak ada Peningkatan lain-lain yang perlu disclosed dalam Rekening Dana Sahaja ini

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
 Sarang	 Keuangan

II. PERIODE			
1	2	2	5

UNIT ORGANISASI			
1. Kode	0	0	5
2. Nama	0	1	3
	0	0	0
	4	0	1
	9	6	8
	0	0	0
	K	D	

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Jl. Pulau Bangka, Komplek Perumahan Bangka Reklamasi

VIII. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN

No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Tot. Rupiah SPPA	Selisih
1	259991346122178	18/12/2025	532111	Sound System	24.500.000	24.500.000	0
2	259991311273860	06/12/2025	532111	Laman	31.499.998	31.499.998	0
3	259991311207586	01/12/2025	532111	Printer	31.499.998	31.499.998	0
4	259991340042298	29/08/2025	532111	Sepeda Motor	22.800.000	22.800.000	0
5	259991330173791	29/08/2025	532111	Air Conditioner	56.445.500	56.445.500	0
6	250151304000823	08/04/2025	532111	Kendaraan Rada 4	310.000.000	310.000.000	0
7	259991311395211	11/12/2025	532111	Mesa Konsultasi	5.000.000	5.000.000	0
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

IX. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUK BMN

No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Tot. Rupiah SPPA	Selisih
							0

NIHIL

X. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG TIDAK/BELUM MEMBENTUK BMN

No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Rebrangan
-----	----------	-----------	--------------	---------------------	------------	-----------

NIHIL



2026

2. Laporan Posisi BMN di Neraca 31 Desember 2025

LAPORAN KURSA KATEGORISASI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025 (AUDITED)

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/04/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 30/04/26 3:13 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_faco_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	16,096,240
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,224,000
131111	Tanah	25,308,000
132111	Peralatan dan Mesin	7,664,791,903
133111	Gedung dan Bangunan	26,580,019,989
135121	Aset Tetap Lainnya	190,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5,733,890,215)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,109,878,089)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	20,290,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(20,290,000)
J U M L A H		26,445,861,828

Pangkalpinang, 30 April 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasas Pengguna Barang





3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2025(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tanggal : 30/04/25 12:35 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_tmrt_neraca_sawal_sstkr_pos

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	2,174,800
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	427,650
131111	Tanah	25,308,000
132111	Peralatan dan Mesin	7,093,238,407
133111	Gedung dan Bangunan	26,580,019,989
135121	Aset Tetap Lainnya	190,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,425,943,614)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,578,206,184)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	20,290,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(20,290,000)
J U M L A H		27,697,209,048



4. Laporan Barang Persediaan

LAPORAN KUASA PENGUNCIAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025 (AUDITED)



BERSEKUTUAN



BERSEKUTUAN



BERSEKUTUAN

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401958 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/04/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 30/04/26 3:13 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satkar_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	308,000
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	357,500
1010301003	Penjepit Kertas	426,500
1010301004	Penghapus/Korektor	18,500
1010301005	Buku Tulis	390,000
1010301006	Ordner Dan Map	1,346,500
1010301007	Penggaris	26,000
1010301008	Cutler (Alat Tulis Kantor)	70,000
1010301010	Alat Perakal	384,500
1010301012	Staples	68,500
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	71,000
1010302001	Kertas HVS	4,075,000
1010302002	Berbagai Kertas	405,000
1010302004	Amplop	249,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	310,000
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	1,635,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	430,000
1010304006	USB/Flash Disk	825,190
1010304010	Mouse	400,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	281,800
1010306001	Kabel Listrik	349,000
1010306002	Lampu Listrik	1,232,000
1010306003	Stop Kontak	55,220
1010306005	Stacker	85,220
1010306010	Batu Baterai	924,000
1010306999	Alat Listrik Lainnya	77,000
1010307006	Atribut	150,000
1010309003	Stempel	180,000
1010309999	Perengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	9,000
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	24,000
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	732,810
Jumlah Barang Konsumsi		16,096,240
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	445,000
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	102,000
1010305004	Kesel Dan Tempat Sampah	75,000
1010305006	Alat Pengikat	101,000
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	848,000
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	68,000
1010305012	Pengharum Ruangan	935,000
1010305999	Peralat Kantor Lainnya	650,000
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		3,224,000
TOTAL		19,320,240

Keterangan :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi rusak. |
| 2. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi usang. |



5. Laporan Barang Intrakomptabel

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 005
UAKPB : 401968

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Draft : 30/04/2025 12:35 PM
Tgl Cetak : 30/04/2025 3:15 PM
Halaman : 11
Kode Lap : lap_bmn_intra_zatker_poc

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025			MUTASI			BERKURANG			SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED		
			Kuantitas	Nilai	Nilai	Kuantitas	Nilai	Nilai	Kuantitas	Nilai	Nilai	Kuantitas	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131111	Tanah		4,000	25,308,000	25,308,000	4,000	25,308,000	25,308,000	4,000	25,308,000	25,308,000	4,000	25,308,000	25,308,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	M2	4,000	25,308,000	25,308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010104026	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilaan	M2	0	0	0	4,000	25,308,000	25,308,000	0	0	0	4,000	25,308,000	25,308,000
132111	Peralatan dan Mesin		447	7,093,238,402	7,093,238,402	33	627,998,956	627,998,956	3	56,443,500	56,443,500	478	7,664,791,903	7,664,791,903
3010301003	Stationary Generating Set	Unit	1	498,199,460	498,199,460	0	0	0	0	0	0	1	498,199,460	498,199,460
3010305010	Pompa Air	Unit	3	116,575,305	116,575,305	0	0	0	0	0	0	3	116,575,305	116,575,305
3020101003	Station Wagon	Unit	1	110,355,000	110,355,000	0	0	0	0	0	0	1	110,355,000	110,355,000
3020102003	Mini Bus (Perumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	220,890,263	220,890,263	1	310,000,000	310,000,000	0	0	0	2	533,880,263	533,880,263
3020104001	Sepeda Motor	Unit	2	40,750,000	40,750,000	1	32,600,000	32,600,000	0	0	0	3	82,350,000	82,350,000
3020104001	Lemari Besi/Metal	Buah	21	82,495,900	82,495,900	9	31,491,998	31,491,998	0	0	0	30	113,985,898	113,985,898
3020104002	Lemari Kayu	Buah	13	128,288,180	128,288,180	0	0	0	0	0	0	13	128,288,180	128,288,180
3050104003	Rak Besi	Buah	2	3,516,060	3,516,060	0	0	0	0	0	0	2	3,516,060	3,516,060
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	19	68,247,200	68,247,200	0	0	0	0	0	0	15	66,247,200	66,247,200
3050104014	Mobile File	Buah	3	240,418,440	240,418,440	0	0	0	0	0	0	3	240,418,440	240,418,440
3050105004	File Alam	Buah	1	207,588,901	207,588,901	0	0	0	0	0	0	1	207,588,901	207,588,901
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	158,215,780	158,215,780	0	0	0	0	0	0	1	158,215,780	158,215,780
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Baan	24	39,160,800	39,160,800	0	0	0	0	0	0	24	39,160,800	39,160,800
3050105048	LCD Projector/InFocus	Buah	2	36,560,000	36,560,000	0	0	0	0	0	0	2	30,590,000	30,590,000
3050105058	Focusing Screen/Layer LCD Projector	Buah	2	7,491,000	7,491,000	0	0	0	0	0	0	2	7,491,000	7,491,000
3050105060	Mesin Awtian	Buah	1	27,500,000	27,500,000	0	0	0	0	0	0	1	27,500,000	27,500,000
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dumny	3	4,192,500	4,192,500	0	0	0	0	0	0	3	4,192,500	4,192,500
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	36	209,435,750	209,435,750	0	0	0	0	0	0	36	209,435,750	209,435,750
3050201003	Kursi Besi/Melati	Buah	118	578,396,230	578,396,230	0	0	0	0	0	0	118	578,396,230	578,396,230
3050201004	Kursi Kayu	Buah	32	197,738,720	197,738,720	0	0	0	0	0	0	32	137,738,720	137,738,720
3050201005	Sica	Baan	5	33,168,300	33,168,300	0	0	0	0	0	0	5	33,168,300	33,168,300
3050201008	Meja Rapat	Buah	11	97,463,550	97,463,550	0	0	0	0	0	0	11	97,463,550	97,463,550
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	1	8,156,280	8,156,280	0	0	0	0	0	0	1	8,156,280	8,156,280
3050201016	Kamir/Spring Bed	Buah	1	6,960,000	6,960,000	0	0	0	0	0	0	1	6,960,000	6,960,000
3050201033	Sofa	set	19	222,591,630	222,591,630	0	0	0	0	0	0	19	222,591,630	222,591,630
3050201036	Meja Penunjang Kantor	UNIT	0	0	0	1	5,000,000	5,000,000	0	0	0	1	5,000,000	5,000,000
3050201999	Meubelair Lainnya	dumny	10	41,288,450	41,288,450	0	0	0	0	0	0	10	41,288,450	41,288,450
3050204002	A.C. Sentral	Baan	1	2,019,589,144	2,019,589,144	0	0	0	0	0	0	1	2,019,589,144	2,019,589,144
3050204004	A.C. Split	Baan	6	30,000,000	30,000,000	2	56,443,500	56,443,500	2	56,443,500	56,443,500	6	30,000,000	30,000,000
3050204005	Portable Air Conditioner (Aua Pendingin)	Baan	0	0	0	2	56,443,500	56,443,500	0	0	0	2	56,443,500	56,443,500
3050206002	Televisi	Buah	16	114,628,000	114,628,000	0	0	0	0	0	0	16	114,628,000	114,628,000
3050206007	LoudSpeaker	Buah	4	23,800,000	23,800,000	0	0	0	0	0	0	4	23,800,000	23,800,000
3050206008	Sound System	Buah	2	140,597,305	140,597,305	1	24,500,000	24,500,000	0	0	0	3	155,097,305	155,097,305

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/04/26 12:56 PM
Tgl Cetak : 30/04/26 3:13 PM
Halaman : 12
Kode Lupa : lap_bmn_intra_sakray_poc

AKUM NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT	BALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTABE				BERKURANG		BALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
KODE	URAIAN			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
3050206020	Camera Video	Buah	1	17.125.000	0	0	0	0	0	1	17.125.000		
3050206030	Tiang Bendera	Buah	1	1.305.360	0	0	0	0	0	1	1.305.360		
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	4.078.140	0	0	0	0	0	1	4.078.140		
3050206056	Karpet	Buah	1	28.138.500	0	0	0	0	0	1	28.138.500		
3050206057	Virtual Bird	Buah	1	155.351.840	0	0	0	0	0	1	155.351.840		
3050206061	Tangkai Air	Buah	2	43.055.320	0	0	0	0	0	2	43.055.320		
3050206085	Tempat Sempuh	Buah	5	5.305.800	0	0	0	0	0	5	5.305.800		
3050101042	Audio Master Control Unit	Buah	1	9.552.000	0	0	0	0	0	1	9.552.000		
3050101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	3	7.602.000	0	0	0	0	0	3	7.602.000		
3050101079	Microphone Cable	Buah	1	9.218.000	0	0	0	0	0	1	9.218.000		
3050201155	Camera Conference	Buah	1	56.652.000	0	0	0	0	0	1	56.652.000		
3050201031	Telephone (PABX)	Buah	1	84.052.544	0	0	0	0	0	1	84.052.544		
3050309999	Peralatan Antena UHF Lainnya	dummy	1	1.100.000	0	0	0	0	0	1	1.100.000		
3050310999	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	dummy	1	8.090.000	0	0	0	0	0	1	8.090.000		
3070101127	Kursi Dorong	Buah	2	9.787.980	0	0	0	0	0	2	9.787.980		
3070112999	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Lainnya	dummy	2	2.010.720	0	0	0	0	0	2	2.010.720		
3070209999	Alat Kesehatan Umum Lainnya	dummy	4	5.422.940	0	0	0	0	0	4	5.422.940		
3100101002	Mini Komputer	Buah	8	106.000.000	0	0	0	0	0	8	106.000.000		
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	1	98.793.732	0	0	0	0	0	1	98.793.732		
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	17.840.000	0	0	0	0	0	1	17.840.000		
3100102001	P.C Unit	Buah	10	186.032.200	0	0	0	0	0	10	186.032.200		
3100102002	Lap Top	Buah	15	202.930.000	0	0	0	0	0	15	202.930.000		
3100102003	Note Book	Buah	0	0	7	80.010.000	0	0	0	7	80.010.000		
3100102009	Tablet PC	Buah	2	15.338.000	0	0	0	0	0	2	15.338.000		
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	9	32.750.800	9	31.498.968	0	0	0	18	64.249.768		
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	28.070.211	0	0	0	0	0	3	28.070.211		
3100204001	Server	Buah	2	125.050.000	0	0	0	0	0	2	125.050.000		
3100204014	Flax Server	Buah	1	9.866.560	0	0	0	0	0	1	9.866.560		
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	2	147.513.240	0	0	0	0	0	2	147.513.240		
133111	Gedung dan Bangunan		3	26.880.019.989	1	24.880.128.093	0	0	24.880.128.093	3	26.880.019.989		
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	24.880.128.093	0	0	0	0	1	0	0		
4010124017	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe C	UNIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010130005	Bangunan Rumah Gendel	Unit	1	368.454.508	0	0	0	0	0	1	368.454.508		
4040104001	Pagar Perimeter	Unit	1	1.323.427.370	0	0	0	0	0	1	1.323.427.370		
135121	Aset Tetap Lainnya		2	180.000	0	0	0	0	0	2	180.000		
6010101001	Monografi	Buah	2	180.000	0	0	0	0	0	2	180.000		
165112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		3	20.290.000	0	0	0	0	0	3	20.290.000		

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 005
UAKPB : 401960

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/04/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 30/04/26 3:13 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_saker_poc

AKUN NERACA/IN-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025				MUTASI				BALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
			BERTAMBAH		BERKURANG		BERTAMBAH		BERKURANG		KUMITAB	NILAI
			KUMITITAS	NILAI	KUMITITAS	NILAI	KUMITITAS	NILAI	KUMITITAS	NILAI		
KODE	URAIAN		4	5	6	7	8	9	10	11		
1		3										
3350105017	Mesin Absensi	Buah	1	6.100.000	0		0		0		1	6.100.000
3350201003	Kursi Besi/Metal	Buah	1	4.200.000	0		0		0		1	4.200.000
3100103001	P.C Unit	Buah	1	9.990.000	0		0		0		1	9.990.000
TOTAL				33.719.046,396		25.541.433,089		24.969.879,593		34.290.589,892		

Pangkalpinang, 30 April 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kusma Panggabene Barang





6. Laporan Barang Ekstrakomptabel

LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/04/2025 12:35 PM
Tgl Cetak : 30/04/2025 3:13 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA SUB-SUB KECAMPAK BARANG				SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		BERTAMBAH				KURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
KODE	URAIAN				Kuantitas	NILAI	Kuantitas	NILAI	Kuantitas	NILAI	Kuantitas	NILAI		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
13211	Peralatan dan Mesin				43	23,763,250		650,000	0	0	44	24,413,250		
3050104002	Lemari Kayu	-			1	950,000		0	0	1		950,000		
3050105015	Alat Penghantar Kertas	-			0	0		650,000	0	0	1	650,000		
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	-			1	905,700		0	0	1		905,700		
3050201002	Meja Kerja Kayu	-			9	4,050,000		0	0	9		4,050,000		
3050201003	Kursi Besi/Metal	-			11	5,240,000		0	0	11		5,240,000		
3050201869	Meubelair Lainnya	-			2	1,100,000		0	0	2		1,100,000		
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	-			1	950,000		0	0	1		950,000		
3050204006	Kipas Angin	-			3	1,005,000		0	0	3		1,005,000		
3050206009	Alat Rumah Tangga Lainnya	-			2	630,000		0	0	2		630,000		
3060101036	Microphone/Wireless MIC	-			1	550,000		0	0	1		550,000		
3060102165	Camera Conference	-			2	782,550		0	0	2		782,550		
3070101146	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	-			1	950,000		0	0	1		950,000		
3100202017	Speaker Komputer	-			1	200,000		0	0	1		200,000		
3100203003	Printer (Peralatan Perekam Komputer)	-			5	3,850,000		0	0	5		3,850,000		
3100203017	External Portable Hardisk	-			3	2,550,000		0	0	3		2,550,000		
TOTAL						23,763,250		650,000		0		24,413,250		

Parigalintang, 30 April 2026
Perangtanjung Jiwab UAKPB
Kumala Perangtanjung Barung





7. Laporan Barang Gabungan

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 005 : MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Draf : 30/04/2012 12:35 PM
Tgl Cetak : 30/04/2012 3:13 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_salkes_pcc

AKUM MERACA SUB-SUB KELDIFON BARANG				SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED		
KODE	URAIAN	2	3		BERTAMBAH		BERKURANG		KUANITAS	NILAI	KUANITAS	NILAI	
			4		5	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS					NILAI
1													
131111	Tanah		4,000	25,308,000		4,000	25,308,000	4,000	25,308,000	4,000	25,308,000	4,000	25,308,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	4,000	25,308,000		0	0	0	25,308,000	0	25,308,000	0	0
2010104026	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	M2	0	0		4,000	25,308,000	4,000	0	0	4,000	0	25,308,000
132111	Peralatan dan Mesin		490	7,117,001,697		34	620,646,996	34	56,443,500	3	7,689,205,193	3	7,689,205,193
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	1	488,199,460		0	0	0	0	1	488,199,460	1	488,199,460
3010305010	Pompa Air	Unit	3	116,575,306		0	0	0	0	3	116,575,306	3	116,575,306
3020101003	Shallon Wagon	Unit	1	110,355,000		0	0	0	0	1	110,355,000	1	110,355,000
3020102003	Mini Bus (Panjang 14 Orang Kabinawah)	Unit	1	223,080,363		1	310,000,000	1	0	2	533,880,363	2	533,880,363
3020104001	Sapoda Motor	Unit	2	49,759,000		1	32,600,000	1	0	3	82,359,000	3	82,359,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	21	82,495,900		9	31,499,996	9	0	30	113,995,896	30	113,995,896
3050104002	Lemari Kayu	Buah	14	129,188,190		0	0	0	0	14	129,188,190	14	129,188,190
3050104003	Rak Besi	Buah	2	3,916,080		0	0	0	0	2	3,916,080	2	3,916,080
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	15	66,247,200		0	0	0	0	15	66,247,200	15	66,247,200
3050104014	Mobile File	Buah	3	240,418,440		0	0	0	0	3	240,418,440	3	240,418,440
3050105004	Fire Alarm	Buah	1	207,599,901		0	0	0	0	1	207,599,901	1	207,599,901
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	158,215,790		0	0	0	0	1	158,215,790	1	158,215,790
3050105009	Papan Visual/Papan Nama	Buah	24	39,160,800		0	0	0	0	24	39,160,800	24	39,160,800
3050105015	Alat Pelighancu Kentas	Buah	0	0		1	650,000	1	0	1	650,000	1	650,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	30,580,000		0	0	0	0	2	30,580,000	2	30,580,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	3	8,396,700		0	0	0	0	3	8,396,700	3	8,396,700
3050105080	Mesin Anjian	Buah	1	27,500,000		0	0	0	0	1	27,500,000	1	27,500,000
3050105099	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	9	4,162,500		0	0	0	0	9	4,162,500	9	4,162,500
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	45	213,485,750		0	0	0	0	45	213,485,750	45	213,485,750
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	129	583,636,230		0	0	0	0	129	583,636,230	129	583,636,230
3050201004	Kursi Kayu	Buah	32	137,739,720		0	0	0	0	32	137,739,720	32	137,739,720
3050201005	Sofa	Buah	5	33,166,300		0	0	0	0	5	33,166,300	5	33,166,300
3050201008	Meja Rapat	Buah	11	97,463,550		0	0	0	0	11	97,463,550	11	97,463,550
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	1	8,150,280		0	0	0	0	1	8,150,280	1	8,150,280
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	1	6,980,000		0	0	0	0	1	6,980,000	1	6,980,000
3050201023	Sofa	set	19	222,591,630		0	0	0	0	19	222,591,630	19	222,591,630
3050201038	Meja Penunjang Kantor	UNIT	0	0		1	5,000,000	1	0	1	5,000,000	1	5,000,000
3050201999	Meubelur Lainnya	dummy	12	42,366,450		0	0	0	0	12	42,366,450	12	42,366,450
3050203001	Mesin Penghulap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	950,000		0	0	0	0	1	950,000	1	950,000
3050204002	A.C. Split	Buah	1	2,019,589,144		0	0	0	0	1	2,019,589,144	1	2,019,589,144
3050204004	A.C. Split	Buah	6	30,000,000		2	56,443,500	2	0	8	56,443,500	8	56,443,500
3050204005	Portable Air Conditioner (Airt Pendingin)	Buah	0	0		2	56,443,500	2	0	2	56,443,500	2	56,443,500
3050204006	Kipas Angin	Buah	3	1,005,000		0	0	0	0	3	1,005,000	3	1,005,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/04/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 30/04/26 3:13 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_saklar_pos

KODE	URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025			MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED		
			BERTAMBAH			BERKURANG			NILAI	KUMANTITAS	NILAI
			KUMANTITAS	NILAI	6	KUMANTITAS	NILAI	8			
1		3	4	5	6	8	10	11			
3050209002	Televisi	Buah	16	114.828.000	0	0	0	0	16	114.828.000	11
3050209007	Loudspeaker	Buah	4	23.800.000	0	0	0	0	4	23.800.000	
3050209008	Sound System	Buah	2	140.587.506	1	24.550.000	0	0	3	165.097.506	
3050209020	Camara Video	Buah	1	17.125.000	0	0	0	0	1	17.125.000	
3050209030	Tiang Bendera	Buah	1	1.305.360	0	0	0	0	1	1.305.360	
3050209037	Minibar/Podium	Buah	1	4.078.140	0	0	0	0	1	4.078.140	
3050209056	Kasrat	Buah	1	28.138.500	0	0	0	0	1	28.138.500	
3050209057	Vertical Blind	Buah	1	155.391.840	0	0	0	0	1	155.391.840	
3050209081	Tangki Air	Buah	2	43.055.320	0	0	0	0	2	43.055.320	
3050209085	Tempat Sampah	Buah	5	5.305.800	0	0	0	0	5	5.305.800	
3060209088	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	2	630.000	0	0	0	0	2	630.000	
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	550.000	0	0	0	0	1	550.000	
3060101042	Audio Master Control Unit	Buah	1	9.552.000	0	0	0	0	1	9.552.000	
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	3	7.602.000	0	0	0	0	3	7.602.000	
3060101078	Microphone Cable	Buah	1	9.218.000	0	0	0	0	1	9.218.000	
3060102165	Camara Conference	Buah	3	57.414.550	0	0	0	0	3	57.414.550	
3060201001	Teleponia (PABX)	Buah	1	84.662.544	0	0	0	0	1	84.662.544	
3060309089	Peralatan Antena UHF Lainnya	dummy	1	1.100.000	0	0	0	0	1	1.100.000	
3060310069	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	dummy	1	8.690.000	0	0	0	0	1	8.690.000	
3070101127	Kursi Dorong	Buah	2	9.787.980	0	0	0	0	2	9.787.980	
3070101146	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	Buah	1	960.000	0	0	0	0	1	960.000	
3070112985	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Lainnya	dummy	2	2.610.720	0	0	0	0	2	2.610.720	
3070209090	Alat Kesehatan Umum Lainnya	dummy	4	6.422.940	0	0	0	0	4	6.422.940	
3100101002	Mini Komputer	Buah	8	105.000.000	0	0	0	0	8	105.000.000	
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	1	98.793.733	0	0	0	0	1	98.793.733	
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	17.840.000	0	0	0	0	1	17.840.000	
3100102001	P C Unit	Buah	10	190.032.200	0	0	0	0	10	190.032.200	
3100102002	Lap Top	Buah	15	202.930.000	0	0	0	0	15	202.930.000	
3100102003	Note Book	Buah	0	0	7	80.010.000	0	0	7	80.010.000	
3100102009	Tablet PC	Buah	2	15.338.000	0	0	0	0	2	15.338.000	
3100202017	Speaker Komputer	Buah	1	200.000	0	0	0	0	1	200.000	
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	14	36.700.000	0	31.409.888	0	0	23	68.109.888	
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	28.570.211	0	0	0	0	3	28.570.211	
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	3	2.550.000	0	0	0	0	3	2.550.000	
3100204001	Server	Buah	2	125.050.000	0	0	0	0	2	125.050.000	
3100204014	Rak Server	Buah	1	9.886.590	0	0	0	0	1	9.886.590	
3100204099	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	2	147.513.240	0	0	0	0	2	147.513.240	

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 005
UAKPB : 401960

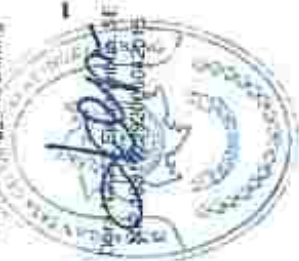
MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/04/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 30/04/26 3:12 PM
Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_gab_saker_poc

AKUM NERACASUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
			Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
Kode	Uraian		4	5	6	7	8	9	10	11
133111	Gedung dan Bangunan		3	24.888,019,989	1	24.888,128,093	1	24.888,128,093	3	26.580,019,989
40101001	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	Unit	1	24.888,128,093	0	0	1	24.888,128,093	0	0
4010124017	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe C	Unit	0	0	1	24.888,128,093	0	0	1	24.888,128,093
4010130035	Bangunan Rumah Genset	Unit	1	308,454,528	0	0	0	0	1	308,454,528
4040104001	Pagar Perimeter	Unit	1	1,323,427,370	0	0	0	0	1	1,323,427,370
135421	Aset Tetap Lainnya		2	190,000	0	0	0	0	2	180,000
6010101001	Monografi	Buah	2	190,000	0	0	0	0	2	190,000
168112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		3	20,290,000	0	0	0	0	3	20,290,000
3000195017	Mesin Absensi	Buah	1	6,100,000	0	0	0	0	1	6,100,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	1	4,200,000	0	0	0	0	1	4,200,000
3100102001	P.C Unit	Buah	1	9,990,000	0	0	0	0	1	9,990,000
TOTAL				33,742,805,646		26,547,083,088		24,969,579,593		34,316,013,142

Pangkalpinang, 30 April 2026
Perangkat Jarak UAKPB
Kues Purdiana Barang





8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025 (AUDITED)

Dr. Siti Nurhidayah
Ketua Bilik Audit



Dr. Siti Nurhidayah



Dr. Siti Nurhidayah



Dr. Siti Nurhidayah

DAFTAR BMN YANG DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
KODE UAKPB : 401568

TANGGAL : 30/04/2020 12:55 PM
Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_po
HALAMAN : dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERKATYPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
Jumlah											

Pangkalpinang, 30 April 2020
Penanggung Jawab UAKPB
Kusca Pangkalpinang Barang





BERKUALITI
PANGKALPINANG

2025

2025

9. Laporan Aset Tak Berwujud

LAPORAN KULASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TAHUN 2025 (AUDITED)

Disyorkan oleh
Pengadil Tatasuahan Negara



Pengadil Tatasuahan Negara



Pengadil Tatasuahan Negara



Pengadil Tatasuahan Negara

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARA
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/04/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 30/04/26 3:13 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmt_seljarah_saikec_poc

1		2	3	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
						BERTAMBAH	BERKURANG	
				KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
KODE		Uraian						

Pangkalpinang, 30 April 2026
Pengadilang Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang





10. Laporan Barang Bersejarah

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 30/04/2025 12:35 PM
Tgl Cetak : 30/04/2025 3:11 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_ssknet_pdc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

AKUN NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025				MUTASI				BERURUNG		SALDO PER 31 DESEMBER 2025 -	
			BERTAMBAH		BERURUNG		BERTAMBAH		BERURUNG		BERTAMBAH		BERURUNG	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	AUDITED			
KODE	URAIAN													

Pangkalpinang, 30 April 2025
Peringatgng Jombh UAKPB
Kuasa Penggilingan Barang





11. Laporan Barang Rusak Berat

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 005
UAKPB : 401966

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/04/25 12:35 PM
Tgl Cetak : 30/04/20 3:13 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_salker_poc

AKUN NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JANUARI S.D. 1 JANUARI 2021	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	PETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0	0	
7010101002	Pelatihan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
TOTAL		0	0	0	0	

Pangkalpinang, 30 April 2026
Peninggalan Jariwa UAKPB
Kuasa Pengguna Barang





12. Laporan Barang Hilang

DAFTAR BMN YANG DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
KODE UAKPB : 401958

TANGGAL : 20/4/2025 12:55 PM
Kode LAP : daftar_bmn_darb_po
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUIP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TYPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
JUMLAH											

Pangkalpinang, 30 April 2025
Perangkatang Jawas UAKPB
Kusaa Pangkalpinang Bering





13. Laporan Barang BPYBDS

LAPORAN KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TAHUN 2025 (AUDITED)



REVISI BARANG



REVISI BARANG



REVISI BARANG

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
KODE UAKPB : 401968

TANGGAL : 30/04/26 12:35 PM
Kode LAP : daftar_bmn_bpybds_p
HALAMAN : 1 dari 3

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

Pangkalpinang, 30 April 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuala Panglima Barang





14. Laporan Barang Hibah DK/TP

LAPORAN KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025 (AUDITED)

Unit Kerja: **Unit Kerja** | **Unit Kerja** | **Unit Kerja** | **Unit Kerja**
Tahun: **2025** | **2025** | **2025** | **2025**



Unit Kerja



Unit Kerja



Unit Kerja

DAFTAR BMN HIBAH DK/TP YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
 KODE UAKPB : 401068

TANGGAL : 16/04/2025 12:35 PM
 Kode LAP : daftar_bmn_dhdktp_poc
 HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

Pangkalpinang, 30 April 2025
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kuasa Pengguna Barang





15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel

LAPORAN KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TAHUN 2025 (AUDITED)



BERKAS



BERKAS



BERKAS

BERKAS

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/04/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 30/04/26 3:13 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_balke_pbc

ASUN PERACADAN SUB KELOMPOK BARANG										
KODE		URAIAN		SAT	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU	
1	2	Kuantitas	Nilai		SALDO AWAL		MUTASI PENYUSUTAN			TOTAL
					6	7	8	9		
131111	Tanah			3	5	6	7	8=6+7	9=5-8	
2010104008	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan			M2	28.308.000	0	0	0	28.308.000	
132111	Peralatan dan Mesin			4.000	25.300.000	0	0	0	25.300.000	
2010204003	Peralatan dan Mesin	418	7.884.791.803			(6.435.543,614)	(1.307.808,401)	(6.730.892,210)	1.030.801.008	
2010305010	Stationary Generating Set	1	498.199.460	Unit		(213.514,055)	(71.171,352)	(284.685,407)	213.514,052	
2010305010	Pemipa Air	3	118.675.305	Unit		(48.900,843)	(16.653,816)	(65.554,659)	48.900,840	
2020101003	Station Wagon	1	110.325.800	Unit		(110.355,000)	0	(110.355,000)	0	
2020102003	Mini Bus (Pemukim M. Orang Kibawah)	2	532.880.363	Unit		(191.817,454)	(76.216,623)	(268.034,077)	265.714,286	
2020104001	Empelas Motor	3	82.350.000	Unit		(42.542,858)	(9.435,713)	(52.078,571)	30.271,429	
2020104001	Lemari Besi/Baja	20	115.895.888	Buah		(54.777,560)	(19.606,180)	(74.427,130)	39.566,768	
2000104002	Lemari Kayu	13	128.288.160	Buah		(67.444,060)	(24.337,036)	(91.781,733)	36.000,457	
2000104003	Ran Besi	2	2.910.000	Buah		(1.908,040)	(780,216)	(2.741,266)	1.174,804	
2000104005	Filing Cabinet Besi	15	16.247.300	Buah		(37.622,150)	(15.248,440)	(50.872,590)	15.374,610	
2000104014	Meblin Fila	3	240.418.440	Buah		(128.808,670)	(46.083,638)	(174.892,308)	63.435,882	
2000105002	Fire Alarm	1	297.398.901	Buah		(124.500,940)	(41.519,583)	(166.079,828)	41.519,881	
2000105007	CCTV - Camera Control Telemeter System	1	168.210.760	Buah		(64.020,474)	(31.843,166)	(95.872,632)	31.843,168	
2000105008	Papan Visual/Papan Nama	24	36.160.800	Buah		(19.500,000)	(7.822,160)	(27.412,160)	11.748,240	
2000105048	LCD Projector/Hidrolis	2	30.660.000	Buah		(16.348,000)	(6.116,000)	(22.464,000)	6.116,000	
2000105008	Focusing Screen/Layer LCD Projector	2	7.491.800	Buah		(4.484,000)	(1.408,200)	(5.892,000)	1.498,200	
2000105080	Mesin Anjutan	1	27.500.000	Buah		(19.250,000)	(6.500,000)	(24.750,000)	2.750,000	
2000105098	Peralatan Kantor Lainnya	3	4.162.500	Qty/ny		(2.981,250)	(1032,500)	(4.013,750)	1.248,750	
2000201002	Meja Kerja Kayu	36	209.435.750	Buah		(126.037,873)	(136.187,153)	(168.005,026)	44.230,725	
2000201003	Kursi Besi/Metal	118	978.096.200	Buah		(317.912,913)	(107.000,246)	(424.952,167)	153.444,068	
2000201004	Kursi Kayu	22	137.738.720	Buah		(74.509,600)	(27.547,544)	(102.057,144)	35.381,918	
2000201005	Sofa	3	33.160.300	Buah		(33.160,000)	0	(33.160,000)	0	
2000201008	Meja Rapat	21	97.463.550	Buah		(48.731,775)	(18.493,713)	(67.225,488)	26.238,085	
2000201010	Tempat Tidur Besi	1	8.156.200	Buah		(4.078,140)	(1.031,250)	(5.709,390)	2.446,884	
2000201010	Kasur/Spring Bed	1	8.990.000	Buah		(8.990,000)	0	(8.990,000)	0	
2000201033	Sofa	19	222.581.000	Beti		(111.290,815)	(64.518,226)	(150.814,141)	68.777,409	
2000201038	Mesa Pemantau Kantor	1	5.000.000	UNIT		0	(500,000)	(450,000)	4.500,000	
2000201098	Meubelatur Lainnya	10	41.286.400	Qty/ny		(120.643,223)	(18.257,760)	(238.160,515)	12.385,935	
2000204002	A.C. Sentral	1	2.018.589.144	Buah		(1.211.753,460)	(403.917,030)	(1.615.671,315)	403.917,029	
2000204004	A.C. Split	6	30.000.000	Buah		(10.000,000)	0	(10.000,000)	0	
2000204005	Portable Air Conditioner (A/C Pendingin)	2	56.443.500	Buah		0	(5.644,350)	(6.444,350)	50.798,150	
2000205007	Tireless	30	114.828.000	Buah		(70.770,000)	(22.368,000)	(93.132,000)	21.098,000	
2000205007	Codepad/ner	4	23.800.000	Buah		(116.660,000)	(41.700,000)	(21.420,000)	2.380,000	
2000205008	Scant System	3	160.087.200	Buah		(194.633,984)	(25.431,861)	(120.085,643)	45.031,581	
2000206020	Camera Video	1	17.135.000	Buah		(18.562,000)	(13.425,000)	(17.987,500)	5.137,500	

BALDIQ 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401965 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/04/26 12:35 PM
Tgl Cetak : 30/04/26 3:13 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_saklat_poc

AKUM NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG		BALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED				
KODE	URAIAN	SAT	KUANITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	
					SALDO AWAL	TOTAL
1	2	3	4	5	6	8-6+7
300201003	Kursi Besi/Metal	Buah	1	4.200.000	(4.200.000)	(4.200.000)
3100102001	P.C. Hm	Buah	1	8.990.000	(8.990.000)	(8.990.000)
JUMLAH					(13.074.430.750)	(1.830.818.006)
						(7.084.058.004)
						38.425.541.588

Pang:opsing, 30 April 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang





16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel

LAPORAN KUASA PENGELOLA BARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025 (AUDITED)



KELOMPOK BARANG



KELOMPOK BARANG



KELOMPOK BARANG

LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/04/25 12:55 PM
Tgl Cetak : 30/04/25 0:13 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmt_amor_sakor_poc

AKUT NERACA SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED								
		SAT								
KODE	URAIAN	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1										



17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud

LAPORAN KURAN HUKUM AKUNTANSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025 (AUDITED)



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

Tgl Data : 30/04/2012 12:55 PM
Tgl Cetak : 30/04/2012 3:13 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap bmn suput eksfra saliver boc

SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED									
AKUMULASI LAB SUB RELOSPROK BARANG				SAT					
KODE	URAIAN			KUANTITAS	HILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NETO BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8	
131111	Peralatan dan Mesin			24.413.280	(19.501.403)	(2.960.330)	(22.461.733)	1.951.546	
3850104003	Lemari Kayu	Buah	44	800.000	(619.000)	(90.000)	(709.000)	80.000	
3900105018	Alat Pemancar Karat	Buah	1	850.000		(130.000)	(130.000)	520.000	
3000105008	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	950.000	(615.100)	(89.870)	(904.970)	45.030	
3000201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	4.000.000	(3.170.000)	(800.000)	(3.970.000)	300.000	
3000201003	Kursi Besi/Metal	Buah	11	5.200.000	(4.341.000)	(810.000)	(4.860.000)	340.000	
3030201898	Musical/Lainnya	Kurny	2	1.100.000	(890.000)	(110.000)	(1.100.000)	0	
3050203001	Mesin Pembersih Carpet/Vacuum Cleaner	Buah	1	900.000	(475.000)	(160.000)	(645.000)	255.000	
3050204006	Kipas Angin	Buah	3	1.000.000	(804.500)	(190.500)	(1.000.000)	0	
3050209009	Alat Rumah Tangga Lainnya	gunny	2	800.000	(567.000)	(83.000)	(650.000)	150.000	
3060101026	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	500.000	(275.000)	(110.000)	(385.000)	115.000	
3060102105	Camera Conference	Buah	2	780.150	(548.275)	(156.510)	(704.785)	77.365	
3070101146	Termometer Mercury Untuk Suhu Basah	Buah	1	350.000	(855.000)	(90.000)	(945.000)	0	
3100202017	Sweeper Kompak	Buah	1	200.000	(125.000)	(50.000)	(175.000)	25.000	
3100303004	Pisau (Peralatan Personal Hygiene)	Buah	5	3.950.000	(3.400.750)	(337.000)	(3.737.750)	118.250	
3100303017	External Harddisk	Buah	3	2.560.000	(2.531.560)	(315.750)	(2.847.310)	716.690	
JUMLAH				24.413.280	(19.501.405)	(2.960.330)	(22.461.735)	1.951.546	

Rangkulpirung, 30 April 2020
Pengarang Jawab: UAM (P)
Kuala Panglima Batang





19. Laporan PNBPN (yang bersumber dari Pengelolaan BMN)

LAPORAN KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025 (AUDITED)



KELOMPOK 1



KELOMPOK 2



KELOMPOK 3

8 FLUIDS	
9	10

K REALISASI PELAKSANAAN PERMINTAAN 2010						
No	PETERANGAN MURAH	Sisa Anggaran	KELUARAN KEMERANGAN			TOTAL
			Belanja Pegawai	Belanja Lain-lain	Belanja Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7
1	DAFTAR LANCAR	0	0	0	0	0
2	Pengeluaran	0	0	0	0	0
3	DAFTAR LANCAR	0	0	0	0	0
4	Tunai	0	0	0	0	0
5	Perantara dan Lain-lain	0	0	0	0	0
6	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
7	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
8	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
9	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
10	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
11	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
12	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
13	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
14	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
15	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
16	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
17	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
18	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
19	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
20	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
21	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
22	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
23	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
24	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
25	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
26	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
27	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
28	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
29	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
30	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
31	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
32	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
33	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
34	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
35	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
36	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
37	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
38	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
39	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
40	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
41	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
42	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
43	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
44	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
45	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
46	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
47	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
48	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
49	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
50	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
51	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
52	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
53	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
54	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
55	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
56	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
57	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
58	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
59	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
60	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
61	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
62	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
63	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0
64	Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0

10. PENGUNCAHAN LAIN



20. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara

LAPORAN KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025 (AUDITED)

Indikator Efisiensi Anggaran: 100% (0%)
Efisiensi Anggaran: 100% (0%)



Indikator Efisiensi Anggaran



Indikator Efisiensi Anggaran



Indikator Efisiensi Anggaran



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

**RESUME PENGASURANSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Nomor : 106/SEK.PTUN.WS-TUN5/PL1.2.5/V/2026

1. Laporan Asuransi BMN 2025

Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tahun 2025 tidak dilaksanakan, sehingga periode pertanggungan selama 0 (nol) bulan. Dengan demikian, tidak terdapat tanggal mulai dan berakhirnya pertanggungan. Nilai pertanggungan BMN yang diasuransikan sebesar Rp 0 (nol rupiah) dengan besaran premi yang dibayarkan sebesar Rp 0 (nol rupiah) (rincian sebagaimana terlampir dalam Tabel A).

2. Klaim Asuransi BMN 2025

- a. Tidak terdapat NUP BMN yang diajukan proses klaimnya pada tahun 2024, sehingga:
 - i. Tidak terdapat NUP BMN yang telah diselesaikan proses klaimnya, dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan tidak ada setoran ke Rekening Kas Umum Negara; dan
 - ii. Tidak terdapat NUP BMN yang masih dalam proses penyelesaian klaim.
- b. Tidak terdapat NUP BMN yang diajukan proses klaimnya sebelum tahun 2025 dan saat ini masih dalam proses penyelesaian klaim. (rincian sebagaimana terlampir dalam Tabel B)

3. Rencana Pengasuransian BMN pada 2026

Berdasarkan Keputusan Rencana Pengasuransian BMN, kegiatan pengasuransian BMN pada tahun 2026 tidak direncanakan untuk dilaksanakan (0 bulan), dengan Nilai Pertanggungan BMN sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan total premi sebesar Rp 0 (nol rupiah). (rincian sebagaimana terlampir dalam Tabel C).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**SEKRETARIS PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

DORA NATALIA SINGARIMBUN

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
5. Sekretaris Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.



Tabel B Laporan Klaim Asuransi BMN 2025

LAPORAN KLAIM PENGURANGAN BMN

No	Kode Sistem Kerja				Nama Barang	VOP	Lokasi					Ruang Pk	SANGKAL KEDAIAN	JENIS KEDAIAN	TANGGAL PENGALIHAN KE KLAIM	REKAM KLAIM YANG DIPERIKAT 1	DOKUMEN PENG. TABAN		Kedatangan			
	Kode Pengguna Barang	Kode Unit Bisnis	Kode Waktu Klaim	Kode Waktu Klaim			Jenis Kedai	RT/RW	Desa / Kecamatan	Kabupaten / Kotamadya	Pengantar						TANGGAL PENGALIHAN KE KLAIM	TANGGAL PENGALIHAN KE KLAIM		TANGGAL PENGALIHAN KE KLAIM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

BMN

Informasi pengantar

1. Kode 1: Kode yang menunjukkan lokasi
2. Kode 2: Kode yang menunjukkan lokasi
3. Kode 3: Kode yang menunjukkan lokasi
4. Kode 4: Kode yang menunjukkan lokasi
5. Kode 5: Kode yang menunjukkan lokasi
6. Kode 6: Kode yang menunjukkan lokasi
7. Kode 7: Kode yang menunjukkan lokasi
8. Kode 8: Kode yang menunjukkan lokasi
9. Kode 9: Kode yang menunjukkan lokasi
10. Kode 10: Kode yang menunjukkan lokasi
11. Kode 11: Kode yang menunjukkan lokasi
12. Kode 12: Kode yang menunjukkan lokasi
13. Kode 13: Kode yang menunjukkan lokasi
14. Kode 14: Kode yang menunjukkan lokasi
15. Kode 15: Kode yang menunjukkan lokasi
16. Kode 16: Kode yang menunjukkan lokasi
17. Kode 17: Kode yang menunjukkan lokasi
18. Kode 18: Kode yang menunjukkan lokasi
19. Kode 19: Kode yang menunjukkan lokasi
20. Kode 20: Kode yang menunjukkan lokasi
21. Kode 21: Kode yang menunjukkan lokasi
22. Kode 22: Kode yang menunjukkan lokasi
23. Kode 23: Kode yang menunjukkan lokasi
24. Kode 24: Kode yang menunjukkan lokasi
25. Kode 25: Kode yang menunjukkan lokasi
26. Kode 26: Kode yang menunjukkan lokasi
27. Kode 27: Kode yang menunjukkan lokasi
28. Kode 28: Kode yang menunjukkan lokasi

Jakarta, 04 April 2025
Sekretaris, Sekretaris Pendidikan, Tala
Karya Negara Pangkajenean Sektur
Setara Karya Pangkajenean


Dina Katala, Pangkajenean, SK, M.M
NIP. 19911226 200004 2 015

Tabel C Laporan Rencana Pengasutanian BMN 2025

[illegible]

Jakarta, 04 April 2026
 Sekretaris Sekretaris Pengendalian Tata
 Usaha Negara Pengkalpinang Sekretaris
 Kepala Kantor Pengawasan Barang

20

Dura Natalia Dominguez, 38, at 44
 001 191 1229 2006 04 2 615

1. How many pages are there?
2. How many pages are there?
3. How many pages are there?
4. How many pages are there?
5. How many pages are there?
6. How many pages are there?
7. How many pages are there?
8. How many pages are there?
9. How many pages are there?
10. How many pages are there?
11. How many pages are there?
12. How many pages are there?
13. How many pages are there?
14. How many pages are there?
15. How many pages are there?
16. How many pages are there?
17. How many pages are there?
18. How many pages are there?
19. How many pages are there?
20. How many pages are there?
21. How many pages are there?
22. How many pages are there?
23. How many pages are there?
24. How many pages are there?
25. How many pages are there?
26. How many pages are there?
27. How many pages are there?
28. How many pages are there?
29. How many pages are there?
30. How many pages are there?
31. How many pages are there?
32. How many pages are there?
33. How many pages are there?
34. How many pages are there?
35. How many pages are there?
36. How many pages are there?
37. How many pages are there?
38. How many pages are there?
39. How many pages are there?
40. How many pages are there?
41. How many pages are there?
42. How many pages are there?
43. How many pages are there?
44. How many pages are there?
45. How many pages are there?
46. How many pages are there?
47. How many pages are there?
48. How many pages are there?
49. How many pages are there?
50. How many pages are there?



21. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025 (AUDITED)



22. Laporan BMN Berupa Rumah Negara

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TAHUN 2025 (AUDITED)



REVISI 1.0



REVISI 1.0



REVISI 1.0



DATA TAMBAHAN



1. Neraca Percobaan Berbasis Akrual dan Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja (2 Dokumen Cetak)

LAPORAN KUASA PENGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
— TAHUN 2025 I AUDITED —

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401988) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 04/05/25 6:24 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 9:18 AM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	325,600	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	16,096,240	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,224,000	0
0.0	131111	Tanah	25,308,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,664,791,903	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	26,580,019,989	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	190,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,733,890,215
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,109,878,089
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	20,290,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	20,290,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	1,720,677,321
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	18,855,572
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	6,141,709,995
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	584,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	80,010,000
0.0	391111	Ekuitas	0	27,692,750,778
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	560,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	24,500
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,131,044,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	16,470	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	58,916,986	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	13,956,038	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	40,320,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	52,485,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	5,214,838	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	47,217,840	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	190,179,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10,290,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	136,350,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	771,874,128	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	3,652,600,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	60,276,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,716	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,004,600	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2,027,760	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	17,745,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	4,320,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401958) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 04/05/26 6:24 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 9:18 AM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	469,928,800	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,829,600	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	52,200,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomplabel	650,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	18,429,607	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,138,665	0
3.0	522141	Beban Sewa	118,400,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	275,082,076	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	156,460,950	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	37,189,010	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	640,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,307,946,601	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	531,671,905	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	28,816,200	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	7,492,550	0
JUMLAH			43,518,646,470	43,518,646,470

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 04/05/26 6:24 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 9:18 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	325,600	0	325,600	0.00
Persediaan	19,320,240	2,602,450	16,717,790	642.39
JUMLAH ASET LANCAR	19,645,840	2,602,450	17,043,390	654.90
ASET TETAP				
Tanah	25,308,000	25,308,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	7,664,791,903	7,093,238,407	571,553,496	8.05
Gedung dan Bangunan	26,580,019,989	26,580,019,989	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	190,000	190,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(7,843,768,304)	(6,004,149,798)	(1,839,618,506)	30.64
JUMLAH ASET TETAP	26,426,541,588	27,694,606,598	(1,268,065,010)	(4.58)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	20,290,000	20,290,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(20,290,000)	(20,290,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	26,446,187,428	27,697,209,046	(1,251,021,620)	(4.52)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Ulang kepada Pihak Ketiga	1,739,532,893	4,458,270	1,735,074,623	38,918.11
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,739,532,893	4,458,270	1,735,074,623	38,918.11
JUMLAH KEWAJIBAN	1,739,532,893	4,458,270	1,735,074,623	38,918.11
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	24,706,654,535	27,692,750,778	(2,986,096,243)	(10.78)
JUMLAH EKUITAS	24,706,654,535	27,692,750,778	(2,986,096,243)	(10.78)
JUMLAH EKUITAS	24,706,654,535	27,692,750,778	(2,986,096,243)	(10.78)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	26,446,187,428	27,697,209,046	(1,251,021,620)	(4.52)

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 198112202006042015





2. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TAHUN 2025 (AUDITED)



Halaman 10 dari 10



www.auditcommission.go.id



www.auditcommission.go.id

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
TRANSFER MASUK
TANGGAL 01-01-2025 s/d 31-12-2025

NAMA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
KODE : 005.01.3000.401968.000.KD

NO. URUT	NO. SPPA	TGL. PEROLEHAN	NO. BUKTI PRLH	NAMA ASET	KETERANGAN
	KD. ASET	TGL. BUKU	MERK/TYPE ASET	ASAL PEROLEHAN	
	NO. ASET	KONDISI	KUANTITAS SATUAN NILAI PER SATUAN	DASAR HARGA TOTAL RUPIAH	
1.	A03251	2025-12-24 00:00:00.0	1041/BUA.7/BAST_PL1. 2.5/XII/2025	Note Book	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang
	3100102003	2025-12-24 00:00:00.0	HP Notebook 240 R G9 (B13TTPC) V-Gen Platinum DDR4 8GB 3200mhz Sodasuri	Transfer Masuk Badan Urusan Administrasi 1. Harga Perolehan	
	1 - 7	-	Buah		

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
TRANSFER KELUAR
TANGGAL 01-01- s/d 31-12-2025

NAMA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
KODE : 005.01.3000.401968.000.KD

NO. URUT	NO. SPPA KD. ASET	TGL. BUKU NO. ASET	NO. DASAR MUTASI	NAMA ASET KETERANGAN
----------	----------------------	-----------------------	------------------	-------------------------



3. Data/Laporan Aset Sengketa (Jika Tidak Ada Dibuat NIHIL)

LAPORAN KIJASA PENGGUNA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025 (I AUDITED)

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

1. TANGGA TAHUNAN	
Desember	Januari

2. PERIODE	
1 2 3	4 5 6

UNIT ORGANISASI	
1. Nama	II - C - 1 - 3 0 0 4 0 3 4 2 9 - 0 0 0 - R D
2. Nama	Pengadilan Tata Usaha Negara Pengalengan K. Prima Bayu, Komplek Pemangrove Bukit Bayu

V. REALISASI RELAKSIAN PEMBENTUK BMN						
NO	PERUBAHAN NEGARA	NILAI AWAL	REALISASI NILAI AWAL			TOTAL
			Berada Berada	Berada Berada	Berada Berada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	AKTIF LAIN-LAIN	4	4	0	0	4
1	AKTIF LAIN-LAIN	4	4	0	0	4
2	Persediaan	0	0	0	0	0
A	AKTIF SETAP	0	0	0	0	0
1	Tanah	0	0	0	0	0
2	Persediaan	0	0	0	0	0
3	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
4	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
5	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
6	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
7	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
8	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
9	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
10	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
11	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
12	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
13	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
14	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
15	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
16	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
17	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
18	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
19	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
20	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
21	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
22	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
23	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
24	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
25	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
26	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
27	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
28	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
29	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
30	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
31	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
32	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
33	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
34	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
35	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
36	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
37	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
38	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
39	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
40	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
41	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
42	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
43	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
44	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
45	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
46	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
47	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
48	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
49	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
50	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
51	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
52	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
53	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
54	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
55	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
56	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
57	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
58	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
59	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
60	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
61	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
62	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
63	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
64	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
65	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
66	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
67	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
68	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
69	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
70	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
71	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
72	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
73	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
74	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
75	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
76	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
77	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
78	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
79	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
80	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
81	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
82	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
83	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
84	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
85	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
86	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
87	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
88	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
89	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
90	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
91	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
92	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
93	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
94	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
95	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
96	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
97	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
98	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
99	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0
100	Perbaikan dan Bangunan	0	0	0	0	0

VI. PERUBAHAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGALANGAN BMN
Jumlah Aset Berwujud yang Dirilis ke pengalihan BMN pada periode Bulan Desember Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp 0.

SIMPUL

VII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada Pengungkapan lain-lain yang perlu diungkapkan dalam Rekapitulasi Data BMN ini

Pengalangan, 28 Januari 2016
Pengalangan, 28 Januari 2016
Kantor Pengalangan
Ditandatangani oleh
Ditandatangani oleh
Ditandatangani oleh



4. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan

**BERITA ACARA KONFIRMASI HIBAH DALAM NEGERI MAHKAMAH AGUNG DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
UNTUK BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2015**

NO	NOMOR REKOR	NAMA PIHAK	MAHKAMAH AGUNG RI										KEMENTERIAN KEUANGAN RI									
			SATUAN GELIA					PENGALIHAN HIBAH TANGGAL 2015 (KAPAL)					PENGALIHAN HIBAH TANGGAL 2015 (KAPAL)					KETERANGAN HIBAH TANGGAL 2015 (KAPAL)				
			BA	SI	KOR	TANGGAL PENGALIHAN HIBAH		TANGGAL PENGALIHAN HIBAH		TANGGAL PENGALIHAN HIBAH		TANGGAL PENGALIHAN HIBAH		TANGGAL PENGALIHAN HIBAH		TANGGAL PENGALIHAN HIBAH		TANGGAL PENGALIHAN HIBAH				
						SATTA UNDA	VALSI	MM	SATTA UNDA	VALSI	MM	SATTA UNDA	VALSI	MM	SATTA UNDA	VALSI	MM	SATTA UNDA	VALSI	MM	SATTA UNDA	VALSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	



5. Gambaran Umum Terkait Pengelolaan BMN





KELOMPOK BARANG KUASA PENGGUNA
PANGKAL PINANG

SEMUKHLAK

2025

DAFTAR LAMPIRAN

1. BA Opname Fisik (Audited)

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PANGKAL PINANG

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

TAHUN 2025 (AUDITED)

Jalan Raya Bagan Pinang 8am, Kecamatan Bagan Pinang,
Kabupaten Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN
(OPNAME FISIK)**

Nomor : 323/SEK.PTUN.W5-TUN5/PL1.2.5/XII/2025

Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG.
Kode Satker : 401968
UAPPB-W : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG.
UAPPB-EI : DIREKTORAT JENDRAL BADIMILTUN

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini Tim opname fisik :

1. Nama : Muhammad Agus, S.E., M.Si. (Kasubbag Umum dan Keuangan)
NIP : 198502072006041001
Jabatan : Ketua.
2. Nama : Fanny Ruspanji, S.E.I. (Bendahara)
NIP : 199208082019032017
Jabatan : Sekretaris.
3. Nama : Ovit Samuel Purba, S.T. (Teknisi Sarana & Prasarana)
NIP : 199111282025061004
Jabatan : Anggota.

Menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan fisik barang persediaan (Opname Fisik) Semester II Tahun 2025 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

Demikian Berita Acara Persediaan (Stock Opname) ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik) :

1. Nama : Muhammad Agus, S.E., M.Si.

2. Nama : Fanny Ruspanji, S.E.I.

3. Nama : Ovit Samuel Purba, S.T.

Pangkalpinang, 31 Desember 2025
Mengetahui,
Kasasa Pengguna Barang
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.
NIP. 198112292006042015



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Kode Satker : 005013000401968000KD.
UAPPB-W : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
UAPPB-EI : DIREKTORAT JENDRAL BADIMILTUN

No	Kode Barang	Nama Barang	KUANTITAS BARANG		Selisih *)	Kondisi	
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang
1	10103010012	Pena balliner	1	1	0	√	-
2	10103010014	Stabilo	5	5	0	√	-
3	10103010015	pena balliner	3	3	0	√	-
4	101030100121	Penggaris	1	1	0	√	-
5	101030100122	Pulpen Standard	1	1	0	√	-
6	101030100126	Pena 3	1	1	0	√	-
7	10103010022	Tinta Printer	1	1	0	√	-
8	10103010028	Tinta Printer Warna	1	1	0	√	-
9	101030100212	Tinta Epson	1	1	0	√	-
10	101030100213	Tinta stempel biru	1	1	0	√	-
11	10103010033	Binder clip 280	3	3	0	√	-
12	10103010036	Binder Clip 107	5	5	0	√	-
13	101030100311	binder clip 105	1	1	0	√	-
14	101030100317	Paper Clip 105	5	5	0	√	-
15	101030100318	Paper clip 107	5	5	0	√	-
16	101030100319	Paper Clip no 111	5	5	0	√	-
17	101030100321	Binder Clip 300 1	2	2	0	√	-
18	10103010041	Tipe X	2	2	0	√	-
19	10103010046	Correction Tape 2	1	1	0	√	-
20	10103010059	Agenda Deli	8	8	0	√	-
21	101030100511	Buku Folio 2	2	2	0	√	-
22	10103010061	box files	2	2	0	√	-
23	10103010064	Map Bisnis File	1	1	0	√	-
24	101030100611	Map bolong	12	12	0	√	-
25	101030100613	Map L	1	1	0	√	-
26	101030100616	Map Biola	1	1	0	√	-
27	101030100626	Box file sika	20	20	0	√	-
28	101030100628	Map Kuning	28	28	0	√	-
29	101030100630	Box Files 3	10	10	0	√	-
30	101030100631	Map Folder	24	24	0	√	-
31	101030100633	Spring File	24	24	0	√	-
32	101030100634	Bantex	10	10	0	√	-



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

No	Kode Barang	Nama Barang	KUANTITAS BARANG		Selsih *)	Kondisi	
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Bal k	Usan g
33	1010301007 3	Penggaris besi 30cm	5	5	0	✓	-
34	1010301007 4	Penggaris Besi 1	2	2	0	✓	-
35	1010301008 1	Cutter	4	4	0	✓	-
36	1010301008 8	Isi Cutter 1	1	1	0	✓	-
37	1010301010 1	alat perekat	4	4	0	✓	-
38	1010301010 4	Lakban Hitam besa r	1	1	0	✓	-
39	1010301010 6	Double tip besar	4	4	0	✓	-
40	1010301010 13	lakban hitam sedan g	1	1	0	✓	-
41	1010301010 14	lakban hitam kecil	1	1	0	✓	-
42	1010301010 26	Busa Perekat	7	7	0	✓	-
43	1010301010 31	Lakban Merah 1	1	1	0	✓	-
44	1010301010 32	Perekat 3m	2	2	0	✓	-
45	1010301010 35	Isolasi Kecil	3	3	0	✓	-
46	1010301010 36	Isolasi Besar	4	4	0	✓	-
47	1010301010 37	Double Tip Kecil 1	1	1	0	✓	-
48	1010301010 40	Lakban coldat 1	1	1	0	✓	-
49	1010301010 42	Lakban hitam kecil 1	1	1	0	✓	-
50	1010301010 43	Sign here 1	1	1	0	✓	-
51	1010301010 44	Lem Stick 1	4	4	0	✓	-
52	1010301012 2	Staples HD 10	3	3	0	✓	-
53	1010301012 7	pembuka staples	2	2	0	✓	-
54	1010301999 9	Gunting Sedang	2	2	0	✓	-
55	1010301999 16	Peruncing	5	5	0	✓	-
56	1010301999 30	Sticky Note	1	1	0	✓	-
57	1010301999 34	Push Pin 1	2	2	0	✓	-
58	1010302001 1	kertas hvs f4	6	6	0	✓	-
59	1010302001 6	Kertas A4 75 gr	5	5	0	✓	-



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

60	1010302001 7	Kertas Hvs F4 1	10	10	0	✓	-
61	1010302001 8	Kertas HVS A4 75 gr 1	5	5	0	✓	-
62	1010302001 9	Kertas HVS I4 2	15	15	0	✓	-
63	1010302001 10	Kertas HVS Biru	2	2	0	✓	-
64	1010302001 11	Kertas HVS I4 3	3	3	0	✓	-
65	1010302001 12	Kertas F4 75 gr	3	3	0	✓	-
66	1010302002 8	kertas stiker	1	1	0	✓	-
67	1010302002 29	Kertas Warna	1	1	0	✓	-
68	1010302002 32	Kertas sampul	1	1	0	✓	-
69	1010302002 35	Post it 654 1	4	4	0	✓	-
70	1010302002 42	Kertas Jilid Buffalo 1	2	2	0	✓	-
71	1010302002 43	Tisu meja 4	2	2	0	✓	-
72	1010302004 4	AMPLOP MAP 2	1	1	0	✓	-
73	1010302004 6	Amplop Kabinet	1	1	0	✓	-
74	1010302004 7	Amplop 90 pps	3	3	0	✓	-
No	Kode Barang	Nama Barang	KUANTITAS BARANG		Selisih *)	Kondisi	
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Bal k	Usan g
75	1010302004 8	Amplop C Kabinet	2	2	0	✓	-
76	1010302004 9	Amplop Coklat	1	1	0	✓	-
77	1010302004 10	Amplop Coklat 1	1	1	0	✓	-
78	1010302004 11	Amplop C F4	1	1	0	✓	-
79	1010302999 9	Kertas Foto	3	3	0	✓	-
80	1010302999 10	PP Pocket	2	2	0	✓	-
81	1010302999 11	Mika bening F4	2	2	0	✓	-
82	1010303999 5	Kwitansi Pengembali an Sisa panjar	10	10	0	✓	-
83	1010303999 7	Tanda Terima PNB	10	10	0	✓	-
84	1010303999 8	CatRidge Hitam	1	1	0	✓	-
85	1010303999 25	SKUM	10	10	0	✓	-
86	1010303999 26	Akriik T AS	4	4	0	✓	-



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

87	1010303999 28	Catridge warna 2	1	1	0	✓	-
88	1010303999 29	Catridge hitam 2	1	1	0	✓	-
89	1010304004 2	Tinta refill 1	2	2	0	✓	-
90	1010304004 3	Tinta Printer 1	6	6	0	✓	-
91	1010304006 3	Flashdisk 32 GB	1	1	0	✓	-
92	1010304006 4	Flashdisk sandisk 32 Gb	7	7	0	✓	-
93	1010304010 2	Mouse 1	2	2	0	✓	-
94	1010304999 5	Konektor HDMI	1	1	0	✓	-
95	1010304999 9	HDMI Splitter	1	1	0	✓	-
96	1010304999 10	HDTV Dongle	1	1	0	✓	-
97	1010305001 2	Sapu lidi	3	3	0	✓	-
98	1010305001 8	Sapu TW	4	4	0	✓	-
99	1010305001 9	Sikat WC 1	3	3	0	✓	-
10 0	1010305001 10	Sikat WC 2	2	2	0	✓	-
10 1	1010305002 7	Karbo Mobil	1	1	0	✓	-
10 2	1010305002 8	Kain Microfiber	2	2	0	✓	-
10 3	1010305002 12	Kain serbet kecil	3	3	0	✓	-
10 4	1010305004 6	Plastik sampah 2	2	2	0	✓	-
10 5	1010305004 8	Keset Kaki 1	2	2	0	✓	-
10 6	1010305006 1	Benang	1	1	0	✓	-
10 7	1010305006 3	Tali Jilid	1	1	0	✓	-



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Pailang Baru, Kec. Pangkulan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

No	Kode Barang	Nama Barang	KUANTITAS BARANG		Selisih)	Kondisi	
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang
108	10103050064	Terminal kabel 5m	1	1	0	√	-
109	10103050065	Tali tambang	1	1	0	√	-
110	10103050081	Pembersih WC 500 ml	2	2	0	√	-
111	101030500836	Pembersih lantai 5	10	10	0	√	-
112	101030500845	Pembersih Toilet	2	2	0	√	-
113	101030500848	Pembersih Toilet 1	1	1	0	√	-
114	101030500850	Pembersih Lantai 7	14	14	0	√	-
115	101030500852	Semprotan Nyamuk 1	2	2	0	√	-
116	101030500853	Pembersih Kaca 9	6	6	0	√	-
117	101030500854	Pembersih toilet 2	5	5	0	√	-
118	101030500918	Gelas kertas Kopi 1	3	3	0	√	-
119	101030500921	Sendok 1	2	2	0	√	-
120	10103050123	pengharum wc 1	1	1	0	√	-
121	101030501220	Pengharum Ruangan 7	11	11	0	√	-
122	101030501221	Pengharum ruangan 8	4	4	0	√	-
123	101030501225	Pengharum Mobil 2	2	2	0	√	-
124	101030501226	Pengharum toilet	4	4	0	√	-
125	101030501227	Pengharum Ruangan 12	3	3	0	√	-
126	10103059999	Kaca Meja	7	7	0	√	-
127	101030599967	Pengki 1	4	4	0	√	-
128	101030599968	Acrylic A5	3	3	0	√	-
129	10103060016	Kabel Listrik	1	1	0	√	-
130	10103060021	Lampu	40	40	0	√	-
131	10103060023	Lampu TL 36 w	1	1	0	√	-
132	10103060024	Lampu led 18 W	20	20	0	√	-
133	10103060032	stop kontak	2	2	0	√	-
134	10103060053	Staker T	2	2	0	√	-
135	10103060054	stacker listrik 1	2	2	0	√	-
136	101030601011	Baterai AA	1	1	0	√	-
137	101030601015	Baterai alkaline AA	1	1	0	√	-
138	10103069993	Klip Kabel	1	1	0	√	-
139	101030699910	Sekring 25 ampere	4	4	0	√	-
140	101030699911	Terminal 4 lobang	1	1	0	√	-



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalun Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33664, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN
(OPNAME FISIK)**

Nomor : 324/SEK.PTUN.W5-TUN5/PL1.2.5/XII/2025

Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG.
Kode Satker : 403429
UAPPB-W : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG.
UAPPB-EI : DIREKTORAT JENDRAL BADIMILTUN

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini Tim opname fisik :

1. Nama : Muhammad Agus, S.E.,M.Si. (Kasubbag Umum dan Keuangan)
NIP : 198502072006041001
Jabatan : Ketua.
2. Nama : Fanny Ruspanji, S.E.I. (Bendahara)
NIP : 199208082019032017
Jabatan : Sekretaris.
3. Nama : Ovit Samuel Purba, S.T. (Teknisi Sarana & Prasarana)
NIP : 199111282025061004
Jabatan : Anggota.

Menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan fisik barang persediaan (Opname Fisik) Semester II Tahun 2025 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

Demikian Berita Acara Persediaan (Stock Opname) ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik) :

1. Nama : Muhammad Agus, S.E., M.Si.

2. Nama : Fanny Ruspanji, S.E.I.

3. Nama : Ovit Samuel Purba, S.T.

Pangkalpinang, 31 Desember 2025

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.

NIP. 198112292006042015



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Kode Satker : 005053000403429000KD.
UAPPB-W : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
UAPPB-EI : DIREKTORAT JENDRAL BADIMILTUN

No	Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas Barang		Salah *	Kondisi	
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang
1	101030100533	Klub Suci	1	1	0	√	-
2	10103070011	Jas Panitera	1	1	0	√	-
3	10103070012	Toga Hakim	11	11	0	√	-
4	10103070061	Tanda Lambang Hakim dan Panitera	13	13	0	√	-
5	10103070062	Kalung Jabatan	2	2	0	√	-
6	10103999997	Laken	1	1	0	√	-
7	10103999998	Bendera Pengadilan	1	1	0	√	-
8	10103999999	Bendera Merah Putih	1	1	0	√	-
9	101039999910	Tanda Jabatan Hakim dan Panitera	1	1	0	√	-

Tim Pelaksana Stock Opname :

1. MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si

2. FANNY RUSPANJI, S.E.I.

3. OVIT SAMUEL PURBA, S.T.

Pangkalpinang, 31 Desember 2025
Mengetahui,
KUASA PENGGUNA BARANG

Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.
NIP. 198112292006042015